

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BNN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

#JatengBersinarPerangiNarkobaBarengBareng

KATA PENGANTAR



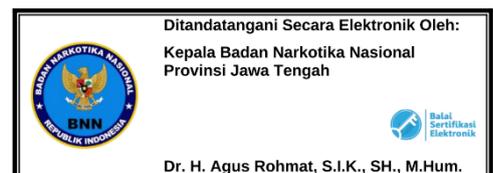
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat tersusun tepat waktu. Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (*performance indicators*).

Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2024 yaitu yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi program dan anggaran dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Melalui kerja keras serta dukungan seluruh staf, secara umum seluruh target yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang tersedia, saya menyadari bahwa tantangan ke depan dalam upaya pelaksanaan P4GN ini semakin memerlukan yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 15 Januari 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan unit eselon II mandiri yang berkedudukan di Provinsi yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan melalui pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif di daerah telah menetapkan target dan sasaran kinerja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Realisasi target kinerja ditetapkan melalui Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional, Produktif, dan Proporsional serta berkinerja tinggi.

Adapun capaian kinerja pada setiap indikator kinerja utama secara ringkas dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran tahun 2024 sebesar Rp.35.254.745.530,- atau sebesar 99.65%;
2. Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan, sebanyak 9 (sembilan) melebihi target, 8 (delapan) sesuai dengan target dan 2 (dua) tidak memenuhi target yang telah ditetapkan;
3. Sisa anggaran merupakan efisiensi dari Belanja Barang dan Belanja Pegawai.
4. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:
 - a. Penyelarasan jadwal kegiatan dalam rangka program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
 - b. Membagi kewenangan dengan membuat Zonasi P4GN bagi BNNK untuk mengampu Kota/Kabupaten terdekat;
 - c. Melaksanakan distribusi tugas lintas seksi untuk menciptakan tim kerja yang solid di setiap Bagian/Bidang di lingkungan BNNP Jawa Tengah;
 - d. Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait lainnya dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - e. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan lintas aparat penegak hukum dan membuat aturan bersama lintas aparat penegak hukum dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN dalam hal penanganan pecandu narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi;
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional;
 - g. Optimalisasi Pendidikan pelatihan bagi personil BNNP Jawa Tengah;

Optimalisasi penggunaan sistem berbasis teknologi sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi & Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Program Kerja	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	11
C. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Analisis Capaian Sasaran	18
B. Akuntabilitas Keuangan	83
BAB IV PENUTUP	87
LAMPIRAN	
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam rangka mengintensifkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai perwakilan di tingkat Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai Instansi Vertikal.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN Provinsi mempunyai tugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah Provinsi dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Melalui ketiga bidang tersebut BNN Provinsi bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa di Provinsi untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif didaerah Program Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) melakukan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN dan Advokasi, Pemberdayaan Peran serta masyarakat dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif, sementara Bidang Rehabilitasi melakukan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba serta Pascarehabilitasi Penyalahguna Narkoba.

Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Alami, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

sintetis, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor, Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran dan Pengawasan dan Perawatan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika serta Pengelolaan Aset.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu unit kerja eselon II mandiri yang berada di wilayah, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut diperuntukkan untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan, tugas dan fungsinya, Laporan pertanggungjawaban dimaksud dinamakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini akan menjelaskan dan menggambarkan kinerja atau hasil yang dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun anggaran terkait dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun dan ditetapkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya RKT tersebut dikukuhkan dalam satu dokumen perjanjian kinerja antara Pengguna Anggaran (PA) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Penanggungjawab kegiatan.

Laporan realisasi dan capaian target setidaknya menggambarkan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja. Penyajian tingkat keberhasilan dan kegagalan unit kerja diuraikan secara gamblang, agar penerima manfaat dapat mengetahui sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan. Keberhasilan atau kegagalan mencapai target diuraikan agar penerima manfaat dapat mengetahui adanya faktor pendorong dan penghambat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi.

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah Instansi Vertikal untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di wilayah Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.

- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada BNNK;
- d. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan program dan anggaran BNNP;
- f. Pelaksanaan administrasi.

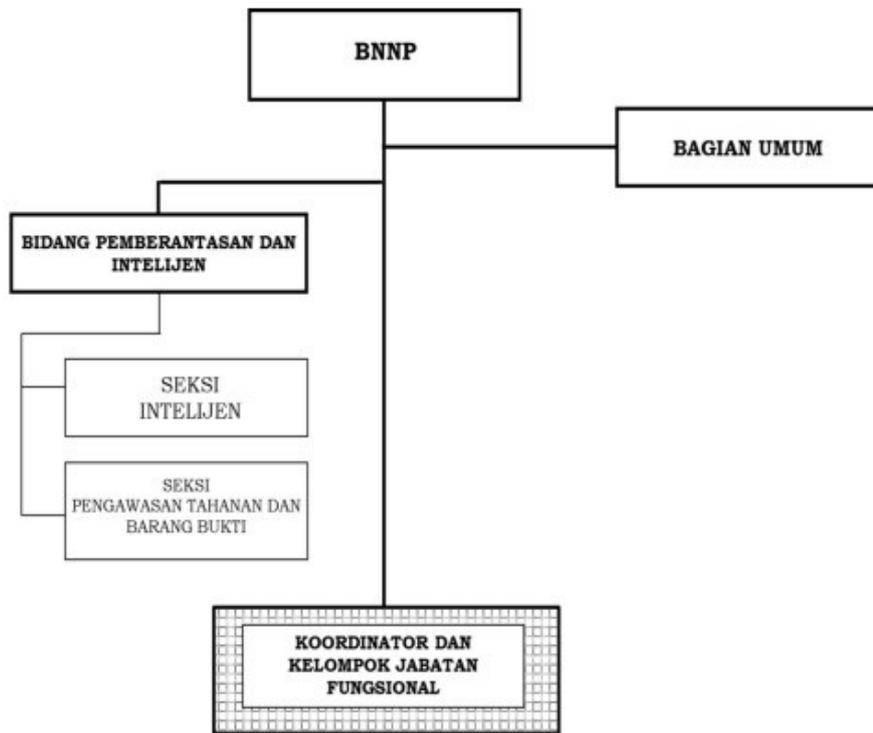
4. Kewenangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010, kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5. Struktur Organisasi.

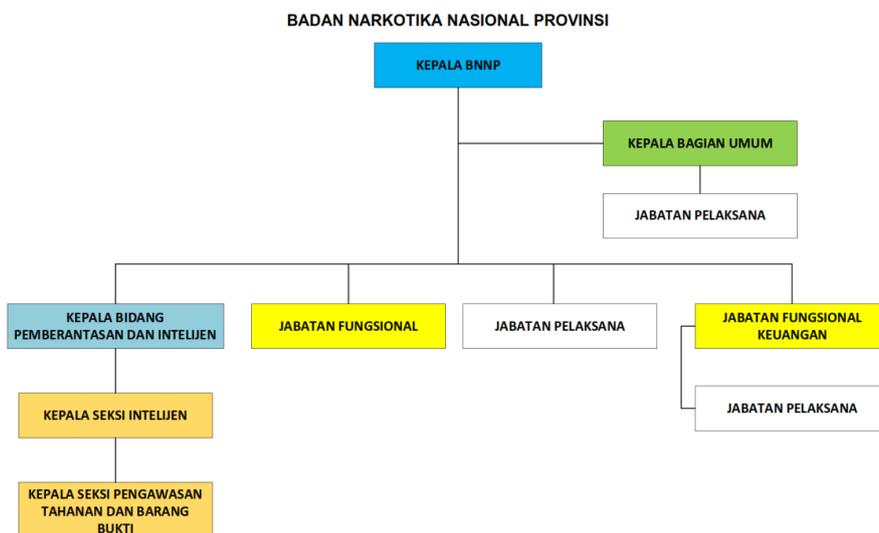
Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah seperti terlihat pada Gambar 1.1 diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Struktur Organisasi BNN Provinsi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:KEP/175/II/KA/KP.07.00//2022/BNN tanggal 15 Februari 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional di Badan Narkotika Nasional Provinsi Peta Jabatan adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Peta Jabatan BNN Provinsi

D. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNNP Jawa Tengah, antara lain Gambaran Umum, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan tentang Rencana Strategis/Rencana Program Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan analisis pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, Permasalahan dan Rekomendasi.

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Program Kerja BNN Provinsi Jawa Tengah

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Program Kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Visi BNN Provinsi Jawa Tengah

“Menjadi Lembaga Penggerak P4GN di wilayah Jawa Tengah yang Profesional dan Berintegritas”

Misi BNN Provinsi Jawa Tengah

“Menyelenggarakan P4GN yang Sinergis, Integratif dan Berkelanjutan Menuju Jawa Tengah Bersih dari Narkoba”

Rencana strategis sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah merupakan dokumen yang sangat penting dalam memberikan arah dan tujuan suatu instansi pemerintah. Selain pada tingkat kelembagaan, dokumen rencana strategis juga menjadi dokumen wajib yang harus tersedia pada setiap unit kerja tingkat eselon I. Kewajiban ini merupakan mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selain juga mandat yang diatur juga dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN. Terkait dengan ketentuan tersebut, BNN telah merumuskan Renstra BNN tahun 2020-2024 sebagai penjabaran Renstra BNN yang memuat tentang berbagai rumusan rencana tindakan dan kegiatan jangka menengah lima tahunan yang dirumuskan untuk diimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian misi dan tujuan organisasi, serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*) untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi organisasi. Renstra tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Program Kerja BNN Provinsi Jawa Tengah yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, TARGET KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Jawa Tengah	N/A	3	3	4	5
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Jawa Tengah	N/A	9	9	9	9
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	N/A	9	9	9	9
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	N/A	1	1	1	1
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan	N/A	3,16	3,16	3,16	3,16

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			yang diintervensi *)					
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	N/A	60	60	60	60
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	N/A	10	10	10	10
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	N/A	4	4	4	4
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	N/A	12	12	12	12
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	N/A	3,2	3,2	3,2	3,2
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	3	2	2	2	2
8.	Penyidikan Jaringan Gelap	Meningkatnya pengungkapan	Jumlah berkas perkara tindak	25	19	19	19	19

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Peredaran Gelap Narkotika	tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21					
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	4	3	3	3	3
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	88	93	93	93	93
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	N/A	9	9	9	9
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	N/A	94	94	94	94

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	N/A	9	9	9	9
13			Nilai Zona Integritas BNN Provinsi oleh TPI	N/A	N/A	N/A	85	86

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renstra dalam target tahunan dan medium penghubung antara Renstra dengan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun yang memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, serta pendanaan anggaran.

Tabel 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Jawa Tengah	8 Kabupaten/Kota	889.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Jawa Tengah	6 Kabupaten/Kota	1.070.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	KEBUTUHAN PENDANAAN
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	9 Kabupaten/Kota	1.942.997.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	69.300.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	3,25 Indeks	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatkan Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Presentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68 %	154.637.000
		Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	3 Lembaga	1.311.677.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan	20 Unit	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	KEBUTUHAN PENDANAAN
			rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah		
7.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,42 Indeks	124.758.000
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	1 Peta Jaringan	235.000.000
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	17 Berkas Perkara	715.000.000
11.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	396.520.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	
12.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	78 Indeks	133.458.000
			Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja	2 Kabupaten/Kota	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	KEBUTUHAN PENDANAAN
			Anggaran mencapai target		
13.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,87 Indeks	15.952.993.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 Kabupaten/Kota	
14.		Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Provinsi oleh TPI	86 Indeks	-
15.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia				123.420.000
16.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Saran dan Prasarana				12.535.328.000
17.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan				110.000.000

C. Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan kontrak kinerja pimpinan unit kerja dengan memperhatikan penetapan kinerja yang berisikan atas sasaran kegiatan, indikator kinerja

kegiatan dan target kinerja yang harus dicapai. Dijelaskan dalam variabel Perjanjian Kinerja:

b. Sasaran kegiatan

Produk akhir (keluaran akhir) yang dihasilkan dari serangkaian proses yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran program.

c. Indikator kinerja kegiatan

Alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

d. Target kinerja

Menunjukkan tingkat indikator kinerja sasaran kegiatan.

Atas dasar variabel tersebut di atas Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	8 Kabupaten/Kota
2		Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	6 Kabupaten/Kota
3		Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/Kota
4		Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,25 Indeks
5	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
6		Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	
7		Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga	
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	20 Unit	
8		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,42 Indeks	
9		Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	
10		Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	17 Berkas Perkara	
11		Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	
12					
13		Terwujudnya manajemen Organisasi Profesional, produktif, dan proposional serta berkinerja tinggi	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	78 Indeks
				Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2 Kabupaten/Kota
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	94,87 Indeks	
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target		9 Kabupaten/Kota		
15	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal		Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	86 Indeks	

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Tahun 2024 mempunyai 15 (tiga belas) sasaran kegiatan dimana sasaran kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran strategis program pada masing-masing ke deputian BNN RI dengan 19 (sembilan belas) indikator kegiatan kinerja yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (RPJM) dan jumlah target yang diperjanjikan dimana Penetapan Kinerja tersebut diturunkan (*cascading*) ke 9 (sembilan) BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, sehingga capaian *outcome* merupakan kompilasi dari BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 atas pencapaian sasaran maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang telah ditetapkan beserta BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pada tahun 2024 indikator yang dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah 15 (lima belas) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BNN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	8 Kabupaten / Kota	7 Kabupaten / Kota	87,5%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	6 Kabupaten / Kota	9 Kabupaten / Kota	180%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,25 Indeks	3,27 Indeks	100,61%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	68,40%	100,58%
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	20 Unit	20 Unit	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,42 Indeks	3,62 Indeks	105,84%
9	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	100%
10	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	17 Berkas Perkara	20 Berkas Perkara	117,64%
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100%
13	Meningkatnya proses manajemen	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	78 Indeks	98,00 Indeks	125,64%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2 Kabupaten / Kota	9 Kabupaten / Kota	450%
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	94,87 Indeks	99,22 Indeks	104,58%
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 Kabupaten / Kota	8 Kabupaten / Kota	88,88%
15	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	86 Indeks	86,28 Indeks	100,32%

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran BNN Kabupaten/Kota selama tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya dan capaian ini merupakan arah untuk capaian periode selanjutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah. Kemudian diuraikan analisa capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja sesuai bidang tugas P4GN sebagai berikut:

1 Sasaran Strategis Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah Jumlah Kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan target capaian 8 (delapan) Kabupaten/Kota.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi	8 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	87,5%

Tabel 5
CAPAIAN JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN INDEKS KETAHANAN DIRI
REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERKATEGORI “TINGGI”
DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	3	6	200%
2022	4	9	225%
2023	8	8	100%
2024	8	7	87,50%

Definisi Operasional

Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. Di tahun 2024, BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki target 8 (delapan) BNN Kab/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi (53,53).

Metode Pengukuran

Indeks Ketahanan Diri Remaja diukur dengan menggunakan skala indeks ketahanan diri. BNN Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki satu program prioritas nasional yaitu Pelatihan *Soft skill* di SMP dan SMU sederajat, sedangkan di BNN Kabupaten/Kota memiliki program prioritas nasional yakni Pembentukan Remaja Teman Sebaya (RTS). Adapun pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara *sampling* pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dan 1 (satu) Ibu kota Provinsi wilayah kerja BNNP dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (*Anti Drug Scale*) yang mencakup 3 (tiga) dimensi, yaitu *Self Regulation* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri; dimensi *Assertiveness* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas; serta dimensi *Reaching Out* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Hasil

Tahun 2024 Kabupaten/Kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi dengan target capaian 8 (delapan) Kabupaten/Kota. BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki target 8

(delapan) Kabupaten/Kota dengan kategori “Tinggi” dengan realisasi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dengan kategori “Sangat Tinggi”, 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan kategori “Rendah” yaitu di BNNK Magelang, dan 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan kategori “Sangat Rendah” yaitu BNN Kota Surakarta. Rata-rata Dektari Provinsi Jawa Tengah berkategori “Tinggi” dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
CAPAIAN DEKTARI BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2023-2024

SATUAN KERJA	DEKTARI PER DESEMBER 2023	KATEGORI DEKTARI PER DESEMBER 2023	DEKTARI PER DESEMBER 2024	KATEGORI DEKTARI PER DESEMBER 2024
BNN Provinsi Jawa Tengah	51.75	Tinggi	55.13	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Temanggung	52.67	Tinggi	54.41	Sangat Tinggi
BNN Kota Tegal	56.58	Sangat Tinggi	55.88	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Banyumas	55.75	Sangat Tinggi	54.63	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Cilacap	54.98	Sangat Tinggi	55.37	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Kendal	55.78	Sangat Tinggi	54.01	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Batang	48.43	Rendah	55.72	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Purbalingga	55.67	Sangat Tinggi	55.73	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Magelang	52.69	Tinggi	49.09	Rendah
BNN Kota Surakarta	50.13	Tinggi	45.36	Sangat Rendah
Dektari Provinsi Jawa Tengah	53.44	Tinggi	53.53	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas terdapat kenaikan capaian nilai Dektari BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran dari tahun 2023 semula 53.44 dengan kategori Tinggi, pada tahun 2023 menjadi 53.53 dengan kategori Tinggi.

Kendala

Indeks Ketahanan Diri Remaja diukur dengan menggunakan skala indeks ketahanan diri. BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki satu program prioritas nasional yaitu Pelatihan *Soft skill* di SMP dan SMU Sederajat, sedangkan di BNNK memiliki program prioritas nasional yakni Pembentukan Remaja Teman Sebaya (RTS). Indeks ketahanan diri sendiri diukur dengan melakukan kegiatan Pelatihan *Soft Skill* di SMP dan SMU Sederajat (untuk BNNP), serta Informasi Edukasi pada Remaja dalam bentuk talkshow (untuk di BNN Kabupaten/Kota), dan kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya atau RTS (di BNN Kabupaten/Kota). Sedangkan di BNNP sendiri, indeks ketahanan diri remaja juga dilakukan dengan mengambil sampel dari kegiatan informasi dan edukasi P4GN yang dilaksanakan secara tatap muka, dimana kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pihak sekolah yang mengundang BNNP dan atau BNNK. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya *automatic adjusment* anggaran informasi dan edukasi melalui *talkshow*/tatap muka di BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran sehingga mengurangi jumlah kegiatan

penyebarluasan informasi dan edukasi yang seharusnya merupakan salah satu penunjang penilaian indeks ketahanan diri anak dan remaja (dektari).

Disamping itu kendala yang lain yaitu, indeks Ketahanan Diri Remaja dapat diukur setelah peserta memperoleh informasi dan edukasi P4GN, sehingga harus terlaksana terlebih dahulu kegiatan baru dapat diukur melalui sampel survei. Pengukuran sendiri dilakukan dengan menginput kuesioner ketahanan diri remaja yang sudah ditentukan oleh BNN RI, dan baru di akhir bulan Desember diketahui nilai dektari tersebut. Disisi lain kendala dalam penginputan kuesioner dikarenakan mundurnya *timeline* kegiatan pelatihan *soft skill* di SMP dan SMU sederajat karena adanya perubahan juknis kegiatan dan juknis terbaru baru diinformasikan BNN RI di bulan Agustus 2024.

Sementara terkait dengan turunnya nilai dektari di BNNK Magelang adalah kurangnya ketelitian dalam melakukan *assesment* terhadap calon responden, sehingga data yang diinput kurang menggambarkan data dan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan di BNN Kota Surakarta yang menyebabkan nilai dektari menjadi sangat rendah di tahun 2024 adalah nilai evaluasi *dependent* yang rendah, dimana nilai evaluasi dependent ini memuat target *output* dan realisasi kegiatan informasi dan edukasi di satker tersebut.

2

Sasaran Strategis

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya diimplementasikan pada indikator kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba	5 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	180%

Tabel 7

CAPAIAN JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERKATEGORI "TINGGI" DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	9	7	77,80%
2022	4	9	225%
2023	5	9	180%
2024	6	9	150%

Definisi Operasional

Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Anti Narkoba bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Di tahun 2024 ini, BNN Provinsi Jawa Tengah memperoleh target 6 (enam) BNN Kabupaten/Kota dengan indeks ketahanan keluarga (dektara) terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi”. Adapun rangkaian kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Anti Narkoba terdiri dari Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Intervensi Program Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keluarga yang diintervensi sebanyak 10 (sepuluh) keluarga. Angka ketahanan diri keluarga (dektara) ini dapat terukur ketika rangkaian kegiatan dari rapat koordinasi hingga intervensi keluarga selesai dilaksanakan.

Metode Pengukuran

Hasil indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba diperoleh dari data perhitungan BNNP dan BNN Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil laporan BNNK dan pelaksanaan kegiatan BNNP Jawa Tengah, keseluruhan BNNK telah menyelesaikan rangkaian kegiatan ketahanan keluarga, dari rapat koordinasi hingga intervensi ketahanan keluarga yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) tahap. Sedangkan di BNN Provinsi Jawa Tengah pelaksanaan ketahanan keluarga menasar di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang, yang termasuk dalam kelurahan yang diintervensi sebagai kelurahan bersinar BNNP Jawa Tengah, dengan mengambil 10 (sepuluh) keluarga dimana anak-anak keluarga tersebut bersekolah di SMP Negeri 15 Semarang. Adapun dari 10 (sepuluh) keluarga tersebut, diambil 5 (lima) keluarga sebagai sampel untuk kuesioner dektara secara *online*. Untuk BNNP Jawa Tengah sendiri, keseluruhan rangkaian kegiatan Ketahanan Keluarga telah selesai dilaksanakan di bulan Mei 2024

Hasil

Tahun 2024 Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi dengan target capaian 6 (enam) Kabupaten/Kota. BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki target 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan kategori “Tinggi” dengan realisasi 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan kategori “Tinggi”.

Tabel 8
CAPAIAN DEKTARA BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2023-2024

SATUAN KERJA	DEKTARA PER DESEMBER 2023	KATEGORI DEKTARA PER DESEMBER 2023	DEKTARA PER DESEMBER 2024	KATEGORI DEKTARA PER DESEMBER 2024
BNN Provinsi Jawa Tengah	86.071	Tinggi	87.321	Tinggi
BNN Kabupaten Temanggung	87.232	Tinggi	84.464	Tinggi
BNN Kota Tegal	84.643	Tinggi	89.107	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Banyumas	86.786	Tinggi	91.518	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Cilacap	85.446	Tinggi	86.161	Tinggi
BNN Kabupaten Kendal	90.000	Sangat Tinggi	86.607	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Batang	94.464	Sangat Tinggi	93.123	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Purbalingga	86.161	Tinggi	90.268	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Magelang	85.446	Tinggi	82.857	Tinggi
BNN Kota Surakarta	91.696	Sangat Tinggi	86.518	Tinggi
Dektara Provinsi Jawa Tengah	86.071	Tinggi	87.231	Tinggi

Adapun rinciannya sebagai berikut 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan kategori “Sangat Tinggi”, dan 4 (empat) Kabupaten/Kota dengan kategori “Tinggi”. Rata-rata Dektara Provinsi Jawa Tengah berkategori “Tinggi”. Berdasarkan tabel diatas terdapat kenaikan capaian nilai Dektara BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran dari tahun 2023 semula 86.071 dengan kategori “Tinggi”, pada tahun 2024 menjadi 87.321 dengan kategori “Tinggi”.

Kualitas Keberhasilan

Indeks Ketahanan Keluarga adalah survei untuk menilai seberapa besar indeks ketahanan keluarga dalam menghadapi godaan narkoba. Adapun tahapan pengisian dektara adalah 10 (sepuluh) orang tua (Ayah/Ibu) yang mengikuti kegiatan intervensi ketahanan keluarga mengisi kuesioner secara manual. Dimana kuesioner tersebut mencakup kuesioner indeks ketahanan keluarga, kuesioner demografi keluarga, dan kuesioner pola pengasuhan orangtua. Kemudian dari hasil pengisian kuesioner 10 (sepuluh) keluarga tersebut dipilih kembali 5 (lima) ayah/ibu dari 5 (lima) keluarga untuk mengisi kuesioner melalui *link dektara.bnn.go.id*. Dari hasil pengisian kuesioner secara *online* tersebut, kemudian diolah oleh Direktorat Advokasi, dimana nilai dektara ini diinformasikan di bulan Desember 2024.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja dan Indeks Ketahanan Keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Telah ditentukannya definisi operasional baik pada tataran sasaran kegiatan maupun indikator kegiatan sehingga mempermudah satker vertikal dalam bekerja.

- b. Sinergitas lintas sektor dari Pemerintah Daerah dan Provinsi setempat serta lembaga serta *stakeholder* lainnya dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya melalui dukungan program intervensi berbasis lingkungan keluarga dan sekolah.
- c. Terbangunnya kesadaran dan kepedulian di Desa/Kelurahan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN dalam pelaksanaan program dan anggaran dana Desa/Kelurahan.
- d. Standar aktifitas dengan penjelasan yang detail mengenai masing-masing jenis kegiatan sebagai pedoman satker vertikal dan pusat dalam bekerja.
- e. Surat Edaran terkait hal-hal teknis yang selalu diberikan sebagai petunjuk lebih lanjut bagi satker vertikal untuk bekerja lebih terarah.
- f. Monitoring dan evaluasi yang terarah oleh satker pusat sebagai pembina fungsi satker vertikal.
- g. Bimbingan teknis dan supervisi yang dilakukan secara optimal sehingga menyamakan gerak dan langkah satker pusat-daerah.
- h. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kinerja dan menjadikan kinerja tersebut sebagai sebuah budaya, dalam konteks ini budaya pelayanan informasi bagi masyarakat Indonesia tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Meskipun target Indikator Kinerja Utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama diantaranya:

- a. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda dari serta partisipasi aktif dari BNNP atau BNN Kabupaten/Kota terkait dengan *entry data* pada aplikasi.
- b. Selalu terjadinya keterlambatan juknis kegiatan terbaru dari pembina fungsi dan tidak adanya petunjuk pelaksanaan juknis tersebut.
- c. Standar pengukuran yang kurang jelas terkait penilaian dektari dan dektara.
- d. Terdapatnya *automatic adjustment* anggaran informasi dan edukasi melalui *talkshow*/tatap muka di BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran sehingga mengurangi jumlah kegiatan penyebaran informasi dan edukasi yang seharusnya merupakan salah satu penunjang penilaian indeks ketahanan diri anak dan remaja (dektari).

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk tahun 2025 upaya penyempurnaan kinerja terkait dengan Dektari dan Dektara agar lebih maksimal perlu direkomendasikan upaya sebagai berikut:

- a. Adanya juknis yang tepat waktu sehingga tidak mengubah *timeline* kegiatan dalam setahun di BNNP dan BNNK, serta adanya bimbingan teknis dan pendampingan oleh pembina fungsi dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja dan Indeks Ketahanan Keluarga.
- b. Perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program ketahanan diri remaja dan ketahanan keluarga anti narkoba yang saling berkesinambungan.

Inovasi untuk mengoptimalkan pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Perumusan nilai Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di mana merupakan rekomendasi bahwa faktor keluarga merupakan faktor penting dalam menumbuhkan ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.
- b. Perumusan nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja di mana merupakan rekomendasi bahwa faktor pergaulan dan lingkungan remaja merupakan faktor penting dalam membentuk ketahanan diri seorang remaja.
- c. Penyusunan juknis program yang mengalami perubahan seperti Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pelaksanaan pada Keluarga, KIE Pendidikan Anti Narkoba, KIE Sumberdaya Pembangunan Desa, dan Pelatihan Teknis Pendidik Sebaya Anti Narkotika.
- d. Penyusunan panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika.
- e. Pembuatan instrumen pengukuran secara *online* Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika dengan menggunakan aplikasi “DektariAja” dengan alamat <https://dektari.bnn.go.id>.
- f. Pembuatan instrumen pengukuran secara online Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dengan menggunakan aplikasi “Dektara” dengan alamat <https://dektara.bnn.go.id>.

3

Sasaran Strategis Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Jumlah Kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi Jawa Tengah	9	9 Kabupaten/Kota	100%

Tabel 9
CAPAIAN JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI BERKATEGORI “MANDIRI” DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	9	9	100%
2022	9	9	100%
2023	9	9	100%
2024	9	9	100%

Definisi Operasional

Kabupaten/Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba adalah kondisi ketanggapsiagaan suatu Kabupaten/Kota dalam melakukan penanganan ancaman narkoba sekaligus memberikan ancangan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota, baik unsur pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melakukan berbagai program intervensi penanggulangan narkoba yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigatif di wilayah Kabupaten/Kota.

Metode Pengukuran

Pengukuran indeks Kabupaten/Kota tanggap ancaman narkoba dilakukan dengan menggunakan survei/pendataan terhadap kondisi aktual daerah dengan instrumen ukur ketanggapan Kabupaten/Kota terhadap ancaman narkoba yang terdiri dari aspek kewilayahan, kelembagaan, hukum, ketahanan masyarakat, dan ketahanan keluarga sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

Hasil

Hasil Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) berkategori sangat tanggap dengan nilai indeks 3.32, yang diperoleh dari data perhitungan BNN Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil laporan BNNK dan pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 10

CAPAIAN IKOTAN BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2023-2024

SATUAN KERJA	NILAI IKOTAN TAHUN 2023	KATEGORI IKOTAN TAHUN 2023	NILAI IKOTAN TAHUN 2024	KATEGORI IKOTAN TAHUN 2024
BNN Provinsi Jawa Tengah	3.11	Tanggap	3.32	Sangat Tanggap
BNN Kabupaten Temanggung	3.25	Tanggap	3.23	Tanggap
BNN Kota Tegal	3.23	Tanggap	3.78	Sangat Tanggap
BNN Kabupaten Banyumas	3.23	Tanggap	3.21	Tanggap
BNN Kabupaten Cilacap	3.27	Sangat Tanggap	3.69	Sangat Tanggap
BNN Kabupaten Kendal	2.59	Cukup Tanggap	3.23	Tanggap
BNN Kabupaten Batang	3.24	Tanggap	3.25	Sangat Tanggap
BNN Kabupaten Purbalingga	3.14	Tanggap	2.89	Tanggap
BNN Kabupaten Magelang	3.43	Sangat tanggap	3.49	Sangat tanggap
BNN Kota Surakarta	2.74	Tanggap	3.03	Tanggap
IKOTAN Provinsi Jateng	3.11	Tanggap	3.32	Sangat Tanggap

Terdapat kenaikan capaian nilai IKOTAN BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran dari Tahun 2023 semula 3,11 dengan kategori “Tanggap”, pada Tahun 2024 menjadi 3,32 dengan kategori “Sangat Tanggap”.

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Dari hasil laporan BNNK dan pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Jawa Tengah, keseluruhan BNNK telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan diawali dengan rapat koordinasi pemetaan program pemberdayaan, rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan Kabupaten/Kota tanggap ancaman narkoba hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang memiliki 5 (lima) variabel yaitu ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan dan hukum dengan indeks skala 1-4. Sedangkan di BNN Provinsi Jawa Tengah sendiri, pelaksanaan bimbingan teknis P4GN dilaksanakan di instansi pemerintah baik dari instansi provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan juga sudah dilaksanakan rapat sinkronisasi IKOTAN yang dilaksanakan di Kota Tegal. Keseluruhan rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan. BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki target 9 Kabupaten/Kota Berdasarkan tabel di bawah terdapat kenaikan capaian nilai Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran dari Tahun 2023 mencapai 3,48 dengan kategori “Sangat Mandiri”, pada Tahun 2024 menjadi 3,59 dengan kategori “Sangat Mandiri”.

Tabel 11

CAPAIAN IKP BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2023-2024

SATUAN KERJA	NILAI IKP TAHUN 2023	KATEGORI IKP TAHUN 2023	NILAI IKP TAHUN 2024	KATEGORI IKP TAHUN 2024
BNN Provinsi Jawa Tengah	3,48	Sangat Mandiri	3.62	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Temanggung	3,66	Sangat Mandiri	4.00	Sangat Mandiri
BNN Kota Tegal	3,29	Mandiri	3.36	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Banyumas	3,38	Sangat Mandiri	3.63	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Cilacap	3,42	Sangat Mandiri	3.50	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Kendal	3,75	Sangat Mandiri	3.78	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Batang	3,32	Sangat Mandiri	3.43	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Purbalingga	3,38	Sangat Mandiri	3.41	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Magelang	3,50	Sangat Mandiri	3.68	Sangat Mandiri
BNN Kota Surakarta	3,42	Mandiri	3.47	Sangat Mandiri
IKP Provinsi Jateng	3.48	Tanggap	3.59	Sangat Mandiri

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan pencapaian Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) adalah sebagai berikut:

- Telah ditentukannya definisi operasional baik pada tataran sasaran kegiatan maupun indikator kegiatan sehingga mempermudah satker vertikal dalam bekerja.
- Sinergi lintas sektor dari Kementerian dan Lembaga serta para *stakeholder* lainnya dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya melalui dukungan program intervensi berbasis lingkungan keluarga.
- Standar pengukuran yang telah lebih jelas dan mudah dipahami terkait Indikator Kegiatan sehingga dapat digunakan satker vertikal dalam pengukuran kinerja mereka masing-masing.
- Standar aktifitas dengan penjelasan yang detail mengenai masing-masing jenis kegiatan sebagai pedoman satker vertikal dan pusat dalam bekerja.
- Bimbingan teknis dan supervisi yang dilakukan secara optimal sehingga menyamakan gerak dan langkah satker pusat-daerah.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) dapat diukur setelah peserta memperoleh informasi dan edukasi P4GN, sehingga harus terlaksana terlebih dahulu kegiatan baru dapat diukur. Pengukuran sendiri dilakukan dengan menginput kuesioner indeks kota tanggap ancaman narkoba yang sudah ditentukan oleh BNN RI.

Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Hal tersebut disiasati dengan mendorong adanya sinergi dengan stakeholder terkait. Dalam rangka meningkatkan responsivitas

Kementerian/Lembaga, swasta dan seluruh instansi yang terkait dilakukan melalui pembentukan aturan atau regulasi antara lain:

- a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Inpres ini mendorong adanya peran serta K/L dan Pemda untuk aktif dalam pelaksanaan P4GN.
- b. Rapat Koordinasi antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan adanya rangkaian rapat koordinasi tersebut, diharapkan masing-masing desa dapat mengalokasikan sebagian dana desanya untuk mendukung P4GN.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk tahun 2025 upaya penyempurnaan kinerja adalah berkoordinasi dan mendorong agar BNNK segera melakukan penginputan kuesioner IKOTAN yang sudah ditentukan oleh BNN RI, selain itu melakukan koordinasi dengan BNN RI terkait hasil Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN).

Guna mengatasi hambatan dan kendala di atas, direkomendasikan upaya:

- a. Perlu adanya bimbingan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) dari Pembina fungsi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI.
 1. Perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan) yang terdapat beberapa variabel yang saling berkesinambungan yaitu : Ketahanan Keluarga; Ketahanan Masyarakat; Kewilayahan; Kelembagaan; Hukum.

4 Sasaran Strategis Meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Beralih Status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi	3,25 Indeks	3,27 Indeks	100,62%

Tabel 12
CAPAIAN JUMLAH KAWASAN RAWAN DI WILAYAH PROVINSI YANG BERALIH
STATUS DARI “BAHAYA” MENJADI ‘WASPADA”

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	1	1	100%
2022	2	2	100%
2023	1	1	100%
2024	1	1	100%

Tabel 13
CAPAIAN NILAI KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN YANG DIINTERVENSI (IKKR)

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	3,16	3,18	100,63%
2022	3,40	3,25	95,58%
2023	3,25	3,25	100%
2024	3,25	3,27	100,62%

Definisi Operasional

Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif.

Metode Pengukuran

Indikator keberhasilan ini merupakan ukuran sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran, antara lain: (1) penyelenggaraan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan dunia usaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat, dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat.

Hasil

Melalui bimtek dengan *life skill* pelatihan teknik dasar servis AC bekerjasama dengan CV Setyo Utomo Teknik Semarang yang dilaksanakan di Kel Gayamsari Kota Semarang yang sebelum diadakan bimtek *life skill* berkategori “Bahaya”, setelah dilakukan bimbingan teknis *life skill* berubah menjadi “Siaga” yaitu dengan nilai IKKR (Indeks Keterpulihan kawasan Rawan) sebesar 3.27 (siaga) dan setelah dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
CAPAIAN IKP BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2023-2024

SATUAN KERJA	IKKR DESEMBER 2023	KATEGORI IKKR DESEMBER 2023	IKKR DESEMBER 2024	KATEGORI IKKR DESEMBER 2024
IKKR Provinsi Jawa Tengah	3.25	Siaga	3.27	Siaga

Berdasarkan tabel diatas terdapat penurunan capaian nilai IKKR BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran dari Tahun 2023 semula 3,25 dengan kategori “Siaga” di Kelurahan Purwosari Kota Semarang, pada Tahun 2024 menjadi 3,27 dengan kategori “Siaga” di Kelurahan Gayamsari Kota Semarang.

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba dapat diukur dengan menggunakan skala indeks kawasan rawan narkoba. BNN Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki satu program prioritas nasional yaitu Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba di wilayah perkotaan, sedangkan di. Sedangkan di BNNP Provinsi Jawa Tenga Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) diri dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada peserta pelatihan bimbingan teknis *life skill* berupa servis AC, yang dilakukan di Kelurahan Gayamsari Kota Semarang. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Telah ditentukannya definisi operasional baik pada tataran sasaran kegiatan maupun indikator kegiatan sehingga mempermudah satker vertikal dalam bekerja.
- b. Sinergi lintas sektor dari Kementerian dan Lembaga serta para *stakeholder* lainnya dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya melalui dukungan program pemberdayaan alternatif.
- c. Terbangunnya kesadaran di desa/kelurahan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN dalam pelaksanaan program dan anggaran dana desa.
- d. Standar pengukuran yang telah lebih jelas dan mudah dipahami terkait Indikator Kegiatan sehingga dapat digunakan satker vertikal dalam pengukuran kinerja mereka masing-masing.
- e. Monitoring dan evaluasi yang terarah oleh satker pusat sebagai pembina fungsi satker vertikal.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba (IKKR) dapat diukur setelah peserta memperoleh Bimbingan Tekhnis *Life skill*, sehingga harus terlaksana terlebih dahulu kegiatan baru dapat diukur. Pengukuran sendiri dilakukan dengan menginput kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Kewirausahaan dan Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba yang sudah ditentukan oleh BNN RI, dan

sampai dengan bulan desember belum keluar hasil perhitungan Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN).

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk tahun 2025 upaya penyempurnaan kinerja adalah berkoordinasi dan diupayakan pendekatan melalui aparat Kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas dan tokoh masyarakat tokoh agama setempat.

kelurahan, babinsa, babinkamtibmas dan tokoh masyarakat toga setempat.

5 Sasaran Strategis Meningkatkan upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Presentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	68,40%	100,58%

Tabel 15
CAPAIAN PRESENTASE PENYALAHGUNA DAN/ATAU PECANDU NARKOTIKA YANG MENGALAMI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2023	63%	71,67%	113,76%
2024	68%	68,40%	126,20%

Definisi Operasional

Presentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan dari hasil perhitungan pengukuran kualitas hidup klien antara sebelum menerima layanan rehabilitasi dengan setelah menerima layanan rehabilitasi sampai selesai program pascarehabilitasi yang dihitung menggunakan pengukuran *WHO-QOL (WHO Quality Of Life)*

Metode Pengukuran

Adapun pengukuran indikator “Presentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup” yaitu menghitung prosentase kenaikan angka kualitas hidup klien dengan membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang telah mengikuti layanan rehabilitasi. Pengukurannya menggunakan instrumen

WHO-QoL yang terdiri dari 4 (empat) domain yaitu domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.

Hasil

Untuk mencapai keberhasilan tersebut di atas indikator kinerjanya adalah meningkatnya presentase kualitas hidup klien korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba. Capaian peningkatan kualitas hidup se-Jawa Tengah sudah melebihi target. Berikut rincian target dan realisasi di masing-masing wilayah:

Tabel 16
CAPAIAN PRESENTASE PENYALAHGUNA DAN/ATAU PECANDU NARKOTIKA
YANG MENGALAMI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP TAHUN 2023 DAN 2024

SATUAN KERJA	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
BNN Provinsi Jawa Tengah	63	71,67	68	68,40
BNN Kabupaten Temanggung	75	90,00	68	98,75
BNN Kota Tegal	75	95,00	68	85,19
BNN Kabupaten Banyumas	75	90,74	68	90,15
BNN Kabupaten Cilacap	70	99,19	68	98,53
BNN Kabupaten Kendal	75	89,29	68	90,00
BNN Kabupaten Batang	63	83,62	68	89,19
BNN Kabupaten Purbalingga	63	77,50	68	76,85
BNN Kabupaten Magelang	63	73,40	68	87,10
BNN Kota Surakarta	70	83,33	68	84,85

Terjadi peningkatan capaian presentase peningkatan kualitas hidup dari tahun 2023 ke tahun 2024 di beberapa wilayah yaitu di BNNK Kendal, BNNK Batang, BNNK Purbalingga, BNNK Temanggung, BNNK Banyumas, BNNK Surakarta, dan BNNK Magelang. Sedangkan di BNN Provinsi Jawa Tengah, BNNK Cilacap dan BNNK Tegal mengalami penurunan capaian presentase peningkatan kualitas hidup klien, hal ini disebabkan karakteristik klien yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Presentase peningkatan kualitas hidup diukur dengan menggunakan *tools* WHOQoL yang diberikan kepada klien pada saat awal layanan (klien belum mendapatkan layanan rehabilitasi) dan akhir layanan (klien sudah mendapatkan layanan rehabilitasi). Cara pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya layanan rehabilitasi dalam meningkatkan kualitas hidup klien.

Faktor keberhasilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup klien dari masing-masing Satker di wilayah Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. BNNP Jawa Tengah

- Komitmen klien dalam menjalankan layanan rehabilitasi berkelanjutan;
- Adanya dukungan dari keluarga klien saat klien menyelesaikan layanan rehabilitasinya;

- Kemampuan petugas rehabilitasi dalam melakukan pendampingan kepada Klien saat menjalankan program rehabilitasi.
2. BNNK Cilacap
 - Komitmen klien yang kuat.
 3. BNNK Kendal
 - Dukungan dari keluarga klien yang ikut mendampingi proses pemulihan klien.
 - Terpenuhinya kebutuhan/solusi dari permasalahan yang dimiliki klien, sehingga klien bisa secara maksimal pulih dan meningkatkan kualitas hidupnya.
 - Adanya beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan/tercapainya capaian di BNNK Kendal yaitu terapi kelompok dan evaluasi perkembangan klien dan pemantauan klien.
 4. BNNK Batang
 - Motivasi klien untuk mempertahankan keputihannya;
 - Adanya dukungan yang penuh pada klien selama program rehabilitasi dan bina lanjut.
 5. BNNK Purbalingga
 - Petugas rehabilitasi melakukan pendampingan dalam pengisian kuesioner.
 6. BNNK Temanggung
 - Asistensi maupun supervisi yang dilakukan secara berkala oleh Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah
 - Tingkat pemahaman klien dalam pengisian instrumen WHOQoL.
 7. BNNK Tegal
 - Dilakukan monitoring secara berkala;
 - Melakukan *treatment* sesuai dengan kebutuhan klien.
 8. BNNK Banyumas
 - Klien mengikuti program rehabilitasi dengan baik.
 9. BNNK Surakarta
 - Melakukan pendampingan klien sampai pada tahap bina lanjut;
 - Membina komunikasi yang baik dengan klien pada saat pendampingan dan pemantauan.
 10. BNNK Magelang
 - Melakukan penjangkauan;

- Membina komunikasi yang baik dengan klien pada saat pendampingan dan pemantauan;
- Melibatkan keluarga klien dalam mendukung pemulihannya.

Target Indikator Kinerja Utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan yang dihadapi dalam proses pencapaian target IKU tersebut diantaranya adalah:

1. BNNP Jawa Tengah

- Capaian peningkatan kualitas hidup mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik klien;
- Beberapa klien tidak menyelesaikan program rehabilitasinya;
- Klien sulit memahami kalimat/pertanyaan dalam instrumen WHOQoL.

2. BNNK Kendal

- Kurangnya jejaring sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan klien;
- Klien pindah rumah atau bekerja di luar kota tanpa konfirmasi kepada petugas;
- Pemantauan klien yang terhambat karena komunikasi yang tidak efektif dengan klien;
- Klien mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan yang ada di form WHOQoL.

3. BNNK Batang

- Klien tidak melanjutkan program rehabilitasinya (DO);
- Lingkungan klien tidak mendukung proses pemulihan klien.

4. BNNK Purbalingga

- Klien tidak mengisi instrumen karena *drop out*.

5. BNNK Surakarta

- Kesulitan dalam mengubah lingkungan klien yang berisiko;
- Terdapat beberapa klien masih dalam proses rehabilitasi;
- Terkadang beberapa klien kurang mendapat dukungan dan perhatian keluarga dalam proses pemulihan.

6. BNNK Magelang

- Terdapat beberapa klien yang *drop out*.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Persentase peningkatan kualitas hidup dapat terpenuhi/dapat diukur setelah klien mengisi instrumen WHOQoL di awal layanan (setelah dilaksanakan asesmen dan penyusunan rencana terapi) dan di akhir layanan rehabilitasi (tahap bina lanjut),

sehingga layanan rehabilitasi harus terlaksana dan klien menyelesaikan layanan rehabilitasi terlebih dahulu. Pengukuran persentase peningkatan kualitas hidup akan dilaksanakan pada bulan desember secara serentak, perhitungan akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI.

Capaian kinerja untuk pemenuhan target persentase peningkatan kualitas hidup memanfaatkan keterbatasan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang sudah tersedia, diantaranya:

1. Keterampilan petugas rehabilitasi dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi klien maupun keluarga klien yang dapat dipenuhi dengan mengikuti pelatihan/peningkatan kemampuan mengenai adiksi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI maupun lembaga rehabilitasi lain yang membuka kelas online seperti Parahita;
2. Petugas rehabilitasi bersama–sama dengan keluarga atau capital pemulihan mendukung pemulihan klien dengan melakukan pendampingan kepada klien;
3. Petugas rehabilitasi memahami instrumen WHOQoL dan melakukan pendampingan kepada klien dalam pengisian instrumen WHOQoL.

Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja

Guna mengatasi hambatan yang ada, maka di tahun 2025 perlu adanya upaya:

1. Adanya peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di bidang adiksi yang dapat diikuti oleh seluruh petugas rehabilitasi;
2. Adanya pelibatan keluarga dalam proses pemulihan;
3. Perlunya meningkatkan motivasi dan pemahaman klien dalam proses rehabilitasi;
4. Perlunya pengawasan klien melalui layanan bina lanjut;
5. Perlunya update informasi/kemampuan dalam memberikan layanan kepada klien;
6. Perlunya pendampingan kepada klien dalam mengisi instrumen dan menjelaskan arti pertanyaan yang terdapat dalam instrumen WHOQoL;
7. Perlunya penerapan komunikasi efektif kepada klien;
8. Perlunya mengumpulkan informasi terkait klien melalui keluarga/orang terdekat.

Selain upaya–upaya tersebut, dapat dilakukan beberapa inovasi untuk mengoptimalkan pencapaian persentase peningkatan kualitas hidup diantaranya:

1. Kerjasama dengan beberapa lembaga/instansi seperti :

- a. Balai Besar Pelatihan Vokasional Produktivitas (BBPVP) Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengembangan diri klien dalam rangka bina lanjut program pasca rehabilitasi (pelatihan kerja);
 - b. Sentra Terpadu Kartini Kementerian Sosial terkait pembinaan kewirausahaan bagi klien;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah terkait penanganan untuk klien perempuan dan anak yang terlibat dengan kekerasan;
 - d. Lembaga/Instansi penyedia layanan kejar paket terkait kebutuhan klien akan pendidikan;
 - e. Puskesmas/Rumah Sakit terkait rujukan untuk masalah kesehatan klien;
 - f. Rumah Sakit yang menyediakan layanan rehabilitasi/Lembaga rehabilitasi terkait rujukan rawat inap layanan rehabilitasi;
 - g. Dinas Pendidikan setempat/Sekolah terkait penanganan rehabilitasi klien yang masih sekolah.
2. Melaksanakan layanan rehabilitasi secara menyeluruh dengan melibatkan klien dan keluarga/kapital pemulihan klien dalam proses rehabilitasi;
 - a. Melaksanakan *overview* materi pelatihan/peningkatan kemampuan terkait adiksi yang sudah dilatih kepada petugas rehabilitasi yang belum mengikuti pelatihan.

6 Sasaran Strategis Meningkatkan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

Tabel 17
CAPAIAN JUMLAH PETUGAS PENYELENGGARA LAYANAN IBM YANG TERLATIH

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	60	60	100%
2022	60	65	108%
2023	100	112	112%
2024	10	10	100%

Definisi Operasional

Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai petugas Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang telah mendapatkan pembekalan/pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu menyelenggarakan/melakukan layanan IBM.

Metode Pengukuran

Adapun pengukuran indikator “Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih” diukur dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan telah mendapatkan SK penunjukan dari Kelurahan/Desa yang ditunjuk sebagai program Intervensi Berbasis Masyarakat dan mampu menjalankan layanan IBM.

Hasil

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang sudah mendapatkan pelatihan/pembekalan mengenai kurikulum layanan IBM secara keseluruhan. Target jumlah petugas penyelenggara layanan IBM dalam IKU pada tahun 2024 antara BNNP dan BNNK terpisah, tidak seperti pada tahun sebelumnya yang menjadi satu menjadi target BNNP. Pemenuhan target BNNP maupun BNNK sudah tercapai, berikut rincian sebaran target dan capaian wilayah:

Tabel 18
CAPAIAN PRESENTASE PENYALAHGUNA DAN/ATAU PECANDU NARKOTIKA
YANG MENGALAMI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP TAHUN 2023-2024

SATUAN KERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
BNN Provinsi Jawa Tengah	15	15	15	15	10	12	10	10
BNN Kabupaten Temanggung	5	5	5	5	10	10	10	10
BNN Kota Tegal	5	5	5	5	10	10	10	10
BNN Kabupaten Banyumas	5	5	5	5	10	10	10	10
BNN Kabupaten Cilacap	5	5	5	10	10	20	10	11
BNN Kabupaten Kendal	5	5	5	5	10	10	10	10
BNN Kabupaten Batang	5	5	5	5	10	10	10	10
BNN Kabupaten Purbalingga	5	5	5	5	10	10	10	12
BNN Kabupaten Magelang	5	5	5	5	10	10	10	10
BNN Kota Surakarta	5	5	5	5	10	10	10	10
TOTAL	60	60	60	65	100	112	100	103

Peningkatan capaian jumlah petugas yang terlatih layanan IBM terjadi dari tahun 2021 sampai tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah Unit IBM di BNNK sehingga jumlah agen pemulihan meningkat. Sedangkan untuk BNNP terjadi penurunan capaian dikarenakan adanya penurunan target Unit IBM yang semula terdiri dari 3 Unit IBM (Tahun 2021) menjadi 2 unit IBM (dari tahun 2022

sampai dengan tahun 2024), sehingga jumlah agen pemulihan juga mengalami penurunan.

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Jumlah petugas layanan IBM yang terlatih dapat dilihat dari pemahaman agen pemulihan dalam menjalankan layanan IBM. Faktor keberhasilan yang dapat mengukur petugas layanan IBM yang terlatih yaitu:

1. BNNP Jawa Tengah

- Agen pemulihan mampu menjalankan layanan IBM sesuai dengan kurikulum yang telah diberikan saat pelatihan/pembekalan;
- Agen pemulihan komitmen dalam menjalankan layanan IBM;
- Bersama dengan Lurah memilih warga Kelurahan/unsur tokoh masyarakat untuk menjadi agen pemulihan;
- Petugas Rehabilitasi dari BNN Provinsi Jawa Tengah yang menjadi fasilitator dalam kegiatan pembekalan/bimbingan teknis agen pemulihan telah mendapatkan bimbingan teknis dari Deputi Bidang Rehabilitasi.

2. BNNK Cilacap

- Dukungan dari pemerintah Desa/Kelurahan.

3. BNNK Kendal

- Adanya koordinasi yang baik antara petugas BNNK Kendal dengan perangkat desa (Kades dan Carik) untuk memilih dan menetapkan calon-calon agen pemulihan yang sesuai;
- Adanya keseriusan dari para calon agen pemulihan dalam mengikuti setiap tahapan di IBM.

4. BNNK Batang

- Adanya komitmen dari masing-masing Agen Pemulihan untuk melaksanakan program IBM;
- Agen pemulihan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah dibagi dalam tim;
- Melibatkan unsur tokoh masyarakat dan perangkat Desa sebagai Agen Pemulihan demi kelancaran program IBM.

5. BNNK Purbalingga

- Koordinasi dengan pemangku kepentingan di Desa potensi masyarakat yang akan menjadi calon Agen Pemulihan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bersedia mengikuti program IBM.

6. BNNK Temanggung

- Bimbingan teknis oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI kepada fasilitator;
- Asistensi maupun supervisi yang dilakukan secara berkala oleh Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah;
- Tingkat penguasaan dan penyampaian materi fasilitator.

7. BNNK Tegal

- Dukungan dari Lurah setempat;
- Masyarakat menerima dan memahami fungsi IBM;
- Adanya regulasi dari Pemerintah Kota.

8. BNNK Surakarta

- Adanya keterlibatan dan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mendukung program IBM;
- Adanya jejaring dengan *stakeholder* terkait atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program IBM.

9. BNNK Magelang

- Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait melalui rapat pembentukan IBM yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Target Indikator Kinerja Utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan dalam proses pencapaian target IKU tersebut di atas adalah:

1. BNNP Jawa Tengah

- Beberapa agen pemulihan belum memahami sepenuhnya materi mengenai program IBM (menganggap layanan IBM hanya sebatas sosialisasi).

2. BNNK Cilacap

- Kesibukan agen pemulihan dalam menjalankan kegiatan.

3. BNNK Kendal

- Sulitnya menentukan waktu dalam penyelenggaraan bimbingan teknis dikarenakan calon agen pemulihan juga bekerja *full time*.
- Kurangnya komitmen peserta bimbingan teknis dalam mengikuti kegiatan pelatihan hingga selesai.

4. BNNK Batang

- Kurangnya pemahaman agen pemulihan tentang pemberian materi pada layanan IBM sehingga harus didampingi oleh petugas BNNK Batang;
- Kesesuaian waktu agen pemulihan karena kesibukan masing-masing agen pemulihan.

5. BNNK Purbalingga

- Agen pemulihan memiliki kegiatan/pekerjaan di luar IBM.

6. BNNK Tegal

- Agen pemulihan memiliki kesibukan ganda;
- Kurangnya dukungan anggaran yang memadai.

7. BNNK Surakarta

- Agen pemulihan masih ragu dalam memberikan penjangkauan dan layanan secara mandiri;
- Sulit menyamakan jadwal antara agen pemulihan dengan BNNK dalam pelaksanaan bimbingan teknis IBM;
- Kurangnya dukungan anggaran dari Kelurahan/swasta untuk pelaksanaan program IBM.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah penyelenggara layanan IBM yang terlatih dapat terpenuhi/dapat diukur setelah agen pemulihan mengikuti bimbingan teknis dan mendapatkan kurikulum layanan IBM secara keseluruhan dan dapat menjalankan layanan IBM. Capaian kinerja untuk pemenuhan target jumlah penyelenggara layanan IBM yang terlatih memanfaatkan keterbatasan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang sudah tersedia, diantaranya:

1. BNNP Jawa Tengah

- Fasilitator dalam kegiatan bimbingan teknis adalah pendamping IBM BNNP Jawa Tengah yang sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya;
- Mendampingi agen pemulihan dalam memberikan layanan IBM;
- Melaksanakan asistensi IBM setiap bulannya;
- Memilih agen pemulihan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan kelurahan dan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi.

2. BNNK Cilacap

- Pemilihan agen pemulihan oleh Kepala Desa yang harus sangat selektif supaya maksimal.

3. BNNK Batang

- Tidak ada penambahan atau pergantian agen pemulihan;
- Adanya SK IBM dan AP.

4. BNNK Tegal

- Melibatkan masyarakat dari seluruh kalangan.

Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja

Guna mengatasi hambatan–hambatan yang ada, maka di tahun 2025 perlu adanya upaya:

1. Perlunya pendampingan yang dilakukan oleh petugas BNNP/BNNK kepada agen pemulihan dalam melaksanakan layanan IBM dan pengisian buku kegiatan maupun buku pemulihan;
2. Perlu adanya komitmen agen pemulihan dan pemerintah Desa/Kelurahan secara maksimal;
3. Perlunya melakukan evaluasi tentang tugas, fungsi dan tanggungjawab agen pemulihan;
4. Perlunya menyusun *timeline* kegiatan dan layanan IBM.

Selain upaya–upaya tersebut, dapat dilakukan beberapa inovasi untuk mengoptimalkan pencapaian penyelenggara layanan IBM yang terlatih diantaranya:

1. Pendamping IBM dari BNNP/BNNK membuat grup melalui aplikasi Whatsapp untuk mempermudah pendampingan/komunikasi dengan agen pemulihan;
2. Apabila ada pergantian agen pemulihan, pendamping IBM mendampingi agen pemulihan yang telah terbentuk dalam memberikan bimbingan teknis kepada agen pemulihan yang baru.

7 Sasaran Strategis Meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Wilayah Provinsi	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Di Wilayah	20 Unit	20 Unit	100%

Tabel 19
CAPAIAN JUMLAH LEMBAGA REHABILITASI YANG MEMENUHI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI WILAYAH PROVINSI

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	4	5	125%
2022	4	5	125%
2023	3	3	100%
2024	3	3	100%

Tabel 20
CAPAIAN JUMLAH UNIT PENYELENGGARA LAYANAN REHABILITASI
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI WILAYAH

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	20	20	100%
2022	20	20	100%
2023	12	13	108,3%
2024	12	12	100%

Definisi Operasional

Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di wilayah Provinsi adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan yang ditetapkan oleh BNN dan atau standar pelayanan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 8807:2022, serta lembaga tersebut telah memberikan layanan rehabilitasi kepada penyalah guna dan atau pecandu narkoba.

Jumlah penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional di Wilayah Provinsi adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya. Intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal yang dibentuk sebagai bagian dari Program Desa Bersinar. Unit IBM yang dibentuk dan minimal telah melakukan kegiatan sosialisasi, pemetaan wilayah, penjangkauan dan skrining (fase 2) kepada korban penyalahgunaan narkoba di wilayah kerja masing–masing unit IBM anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai petugas Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang telah mendapatkan pembekalan/pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu menyelenggarakan/melakukan layanan IBM.

Metode Pengukuran

1. Pengukuran indikator “Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di wilayah Provinsi” dilakukan dengan mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.
2. Pengukuran indikator “Jumlah penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional di Wilayah Provinsi” dengan mendata jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran

Hasil

Tabel 21
LEMBAGA YANG TELAH MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI 8807:2022)
DI WILAYAH JAWA TENGAH TAHUN 2021-2024

NO	NAMA LEMBAGA	TARGET SNI/SPM (PN/REGULER)	TAHUN SNI/SPM
1	Klinik Pratama Enggal Waras BNNP Jateng	SPM	2021
2	Klinik Pratama BNNK Surakarta	SPM	2021
3	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten	SPM	2021
4	RSJD Prof. Dr. Soerojo Magelang	SPM	2021
5	Yayasan Lentera Indonesia Sragen	SPM	2021
6	Yayasan Al Ma'laa Grobogan	SNI PN	2021
7	Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta	SNI PN	2021
8	Klinik Pratama Rawat Jalan Adiksia Medika BNNK Banyumas	SNI Reguler	2022
9	Klinik Pratama Rawat Jalan “SEHATI” BNNK Cilacap	SNI Reguler	2022
10	Klinik Pratama Bina Sehat BNNK Magelang	SNI Reguler	2022
11	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten	SNI Reguler	2022
12	RSJD Prof. Dr. Soerojo Magelang	SNI Reguler	2022
13	Klinik Enggal Waras BNNP Jateng	SNI PN	2022
14	Klinik BNNK Surakarta	SNI PN	2022
15	Puskesmas Karanganyar Kebumen	SNI Reguler	2023
16	Klinik Pratama Bina Sehat BNNK Batang	SNI Reguler	2023
17	Klinik Pratama BNNK Temanggung	SNI Reguler	2023
18	Puskesmas Karanganyar Kebumen	SNI PN	2024
19	Klinik Pratama BNNK Temanggung	SNI PN	2024
20	Klinik Pratama Bina Sehat BNNK Magelang	SNI PN	2024
21	Klinik Pratama BNNK Kendal	SNI Reguler	2024
22	Klinik Pratama BNNK Tegal	SNI Reguler	2024
23	Klinik Pratama BNNK Purbalingga	SNI Reguler	2024

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah lembaga mampu memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia 8807:2022 dan layanan

rehabilitasi bagi penyalah guna dan atau pecandu narkoba telah terlaksana rehabilitasi. Target Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di wilayah Provinsi telah tercapai, berikut rincian lembaga rehabilitasi yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun Standar Nasional Indonesia (SNI 8807:2022).

Pada tahun 2021 penilaian lembaga sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 8807:2019) Prioritas Nasional dilakukan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, sedangkan untuk wilayah masih menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Di tahun 2022 adanya perubahan kebijakan dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI yaitu sudah tidak lagi dilakukan penilaian menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) melainkan menggunakan penilaian Standar Nasional Indonesia (SNI 8807:2019). Beberapa lembaga yang telah dilakukan penilaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada tahun 2021 dan beberapa lembaga baru diajukan untuk dilakukan penilaian Standar Nasional Indonesia (SNI 8807:2019) baik SNI reguler maupun SNI Prioritas Nasional. Di tahun 2023 Jawa Tengah tidak mendapatkan target SNI Prioritas Nasional, sehingga diajukan beberapa lembaga baru untuk dilakukan penilaian SNI 8807:2022 reguler. Di tahun 2024, beberapa lembaga yang telah ditetapkan SNI di tahun sebelumnya diajukan untuk dilakukan penilaian SNI 8807:2022 Prioritas Nasional, sedangkan untuk pemenuhan SNI reguler diajukan lembaga baru.

Selain adanya target IKU tersebut, ada pemenuhan target lembaga rehabilitasi yang operasional untuk BNNK. Berikut lembaga rehabilitasi mitra BNNP dan BNNK yang operasional:

Tabel 22
LEMBAGA YANG TELAH MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA
(SNI 8807:2022) DI WILAYAH JAWA TENGAH TAHUN 2021-2024

NO	WILAYAH	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	LEMBAGA	JUMLAH KLIEN 2022	JUMLAH KLIEN 2023	JUMLAH KLIEN 2024
1	BNNK Batang	2	2	RS H. A. Zaky Djunaid	45	19	15
				Klinik dr. Henny Rosita Batang	-	-	211
2	BNNK Magelang	1	2	RS Aisyiyah Muntilan	3	1	3
				Panti Rehabilitasi Betesda	2	13	12
3	BNNK Cilacap	1	2	Panti Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa Dan Narkoba Tambihul Ghofilin (Sudah tidak bermitra di tahun 2024)	23	15	-
				Klinik Karlina (Sudah tidak bermitra di tahun 2024)	1	2	-

NO	WILAYAH	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	LEMBAGA	JUMLAH KLIEN 2022	JUMLAH KLIEN 2023	JUMLAH KLIEN 2024
				Klinik PKU Muhammadiyah Sampang (Tahun 2024 tidak operasional)	3	2	0
				RSUD Cilacap (Baru bermitra di tahun 2024 dan tidak operasional di tahun 2024)	-	-	0
				Puskesmas Cilacap Selatan (Baru bermitra di Tahun 2024)	-	-	2
				Klinik Panji Medika (Baru bermitra di tahun 2024)	-	-	1
4	BNNK Purbalingga	2	2	Yayasan Annur H. Supono	36	41	65
				Klinik BNNK Purbalingga	0	23	27
5	BNNK Temanggung	1	1	RSUD Kabupaten Temanggung	0	0	3
6	BNNK Tegal	1	1	Klinik BNNK Tegal	15	15	18
				Puskesmas Tegal Timur (Tidak operasional dari 2022 – 2024)	0	0	0
				Klinik Aisyah Siti Hajar (Tidak operasional dari 2022 – 2024)	0	0	0
7	BNNK Banyumas	1	4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	41	44	56
				RSUD Banyumas	25	50	101
				Puskesmas Baturraden 1	0	0	14
				Sentra Satria Baturraden	36	57	55
8	BNNK Surakarta	1	6	RSJD Arif Zainuddin	114	51	52
				RSUD dr. Moewardi	16	16	21
				RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo (Baru bermitra di tahun 2024)	-	-	10
				Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa	142	77	128
				Yayasan Anargya Sober House	16	55	21
				Yayasan Sedah Mirah	-	-	20
				Klinik Imron Medika (Sudah tidak bermitra di tahun 2024)	0	1	-
9	BNNK Kendal	1	1	Klinik Pratama BNNK Kendal	0	13	14
				RSUD Soewondo Kendal (Baru bermitra di tahun 2024 dan tidak operasional)	-	-	0
10	BNNP Jawa Tengah	Tidak memiliki target lembaga yang operasional		RSJ Prof dr. Soerojo Magelang	158	58	333
				RSJD Dr. Amino Gondohutomo Prov. Jateng	190	78	311

NO	WILAYAH	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	LEMBAGA	JUMLAH KLIEN 2022	JUMLAH KLIEN 2023	JUMLAH KLIEN 2024
				RSJD Dr. RM Soedjarwadi Prov. Jateng (Klaten)	5	31	50
				Puskesmas Karanganyar Kebumen	4	10	9
				Puskesmas Poncol Semarang	13	7	6
				RSUD dr. Soedirman Kebumen (Tidak operasional)	0	0	0
				RS Bhayangkara Semarang (Tidak bermitra di tahun 2024)	0	0	-
				DKT Gombang	0	0	0
				Yayasan At Tauhid Semarang	35	37	32
				Yayasan Al Ma'laa Grobogan	38	31	23
				Yayasan Cinta Kasih Bangsa Ungaran	87	29	15
				Yayasan Ayodya Jepara	39	35	25
				Yayasan Maunatul Mubarak Demak	31	27	22
				Yayasan Lentera Bangsa Indonesia Sragen	49	57	42
				Yayasan Elkana Semarang (Tidak bermitra di tahun 2024)	-	10	-
				Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Semarang (Tidak bermitra di tahun 2024)	-	60	-
				Yayasan Rumah Damai Semarang	2	20	5

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang telah terbentuk dan menjalankan layanan IBM. Unit penyelenggara layanan IBM secara keseluruhan capaiannya meningkat. Target dan Capaian BNNK setiap tahunnya meningkat, hanya BNNP saja yang target dan capaiannya menurun, hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang telah ditetapkan oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI terkait pemerataan target unit penyelenggara IBM seluruh Indonesia. Pemenuhan target sudah tercapai, berikut rincian sebaran target dan capaian di masing-masing wilayah:

Tabel 23
SEBARAN TARGET DAN CAPAIAN
UNIT PENYELENGGARA IBM YANG TELAH TERBENTUK PER WILAYAH (SNI 8807:2022)
DI WILAYAH JAWA TENGAH TAHUN 2021-2024

SATUAN KERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
BNNP Jawa Tengah	3	3	3	3	2	2	2	2
BNNK Cilacap	1	1	1	3	2	2	2	2
BNNK Kendal	1	1	1	1	2	2	2	2
BNNK Batang	1	1	1	1	2	2	2	2
BNNK Purbalingga	1	1	1	1	2	2	2	2
BNNK Temanggung	1	1	1	1	2	2	2	2
BNNK Tegal	1	1	1	1	2	2	2	2
BNNK Banyumas	1	1	1	1	2	2	2	2
BNNK Surakarta	1	1	1	1	2	2	2	2
BNNK Magelang	1	1	1	1	2	2	2	2
TOTAL	12	12	12	14	20	20	20	20

Untuk menunjang pemenuhan unit penyelenggara layanan IBM diperlukan adanya klien yang mengakses layanan IBM, berikut sebaran klien pada unit IBM:

Tabel 24
SEBARAN TARGET DAN CAPAIAN
KLIEN UNIT PENYELENGGARA IBM YANG TELAH TERBENTUK PER WILAYAH
TAHUN 2021-2024

SATUAN KERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
BNNP Jawa Tengah	40	38	24	24	16	16	10	10
BNNK Cilacap	5	5	10	10	10	10	10	10
BNNK Kendal	5	5	5	5	8	8	6	6
BNNK Batang	8	8	8	8	10	10	10	10
BNNK Purbalingga	8	8	8	8	10	10	10	11
BNNK Temanggung	4	4	4	4	4	4	8	8
BNNK Tegal	8	8	8	8	8	8	8	8
BNNK Banyumas	20	20	10	10	10	10	10	10
BNNK Surakarta	20	20	10	10	10	12	10	10
BNNK Magelang	18	18	8	8	9	10	8	8
TOTAL	12	12	136	134	95	95	95	98

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah Provinsi dapat dilihat dari terpenuhinya kriteria lembaga sesuai dengan instrumen Standar Nasional Indonesia (SNI 8807:2022) dan adanya klien yang mengakses layanan di lembaga tersebut. Faktor keberhasilan yang dapat mengukur IKU tersebut yaitu:

1. BNNP Jawa Tengah

- Petugas pendamping SNI BNNP sudah memiliki keterampilan/kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga mitra;

- Petugas pendamping SNI BNNP sudah mendapatkan pembekalan dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI dalam melakukan pendampingan dan penilaian SNI;
 - Dilakukannya pendampingan pemenuhan SNI oleh petugas rehabilitasi BNNP kepada lembaga mitra secara masif;
 - Petugas rehabilitasi dari BNNK dan lembaga mitra sudah memiliki kemampuan dalam memberikan layanan rehabilitasi yang didapatkan dari pelatihan/peningkatan kemampuan adiksi;
 - Komitmen lembaga mitra dalam pemenuhan lembaga sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada penyalah guna dan atau pecandu narkoba;
 - Klien kooperatif mengakses layanan rehabilitasi.
2. BNNK Cilacap
- Komitmen manajemen dalam penyelenggaraan layanan.
3. BNNK Kendal
- Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal perihal penerbitan ijin operasional Klinik Pratama Bina Waras BNNK Kendal;
 - Petugas rehabilitasi baik di lembaga rehabilitasi maupun Klinik BNNK Kendal telah diberi peningkatan kemampuan, sehingga layanan dapat berjalan sesuai ketentuan.
4. BNNK Batang
- Kemudahan dalam mengakses layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi;
 - Ketersediaan SDM Dokter Psikiatri.
5. BNNK Purbalingga
- Koordinasi dengan lembaga mitra, BNNP Jateng dan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI.
6. BNNK Temanggung
- Tersedapatnya rujukan dari Instansi lain seperti Polres dan BNNK ke lembaga mitra.
7. BNNK Tegal
- Lembaga mitra dan BNNK memanfaatkan SDM dengan semaksimal mungkin dalam memberikan layanan rehabilitasi;
 - Melaksanakan monev dan Bimtek secara berkala.
8. BNNK Surakarta
- Melaksanakan Bimtek dan Monev secara berkala.

9. BNNK Magelang

- Melaksanakan bimtek dan monev secara berkala.

Target Indikator Kinerja Utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam proses pencapaian target IKU tersebut di atas adalah:

1. BNNP Jawa Tengah

- Minimnya anggaran yang tersedia di BNNP, sehingga pendampingan (Bimbingan teknis) dan penilaian (Monev) kepada beberapa lembaga tidak dapat dilakukan secara langsung/tatap muka;
- Adanya beberapa lembaga yang tidak kooperatif dalam pemenuhan SNI;
- Beberapa lembaga yang menjadi mitra BNNP dan BNNK tidak dapat diusulkan menjadi SNI Prioritas Nasional dikarenakan menjadi kewenangan dari Kementerian (Kemenkes) lembaga tersebut;
- Minimnya lembaga mitra BNNP yang dapat memenuhi kriteria SNI;
- Beberapa SDM lembaga mitra yang telah mendapatkan pelatihan/peningkatan kemampuan sudah pindah/tidak bekerja di lembaga tersebut lagi.

2. BNNK Cilacap

- Terbatasnya kesempatan akses pada peningkatan kemampuan petugas layanan;
- *Turn over* petugas layanan yang cepat.

3. BNNK Kendal

- Lembaga mitra BNNK tidak operasional, sehingga Klinik BNNK Kendal menjadi lembaga yang memenuhi target IKU BNNK;
- Klien tidak konsisten dalam kedatanag untuk program rehabilitasinya;
- Ada kegiatan di luar kegiatan rehabilitasi yang mengganggu jadwal klien untuk rehab;
- Stigma negatif penyalahguna narkoba sehingga malu atau takut dalam mengakses layanan rehabilitasi sehingga pelayanan rehabilitasi di Instansi Pemerintah tidak berjalan secara optimal.

4. BNNK Batang

- Adanya SDM yang telah terlatih resign dari lembaga;
- Pembiayaan IPWL sudah tidak bisa lagi diklaimkan ke Kemenkes.

5. BNNK Purbalingga

- Proses penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan penerbitan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional memerlukan waktu lama dan berjenjang.

6. BNNK Temanggung

- Tidak adanya dukungan anggaran bagi LRKM.

7. BNNK Tegal

- Layanan Rehabilitasi di Komponen Masyarakat kurang maksimal karena kurangnya SDM terlatih/terjadi mutasi.

8. BNNK Banyumas

- Banyak klien yang hanya mencari obat;
- Klien tidak datang sesuai jadwal;
- Klien yang susah dihubungi;
- Jumlah SDM yang tersertifikasi kurang karena mutasi ke tempat lain.

9. BNNK Surakarta

- Layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat belum berjalan optimal karena terkendala kurangnya SDM yang terlatih;
- Tidak ada bangsal rawat inap khusus napza di RSUD Dr Moewardi dan RSAU Dr. Siswanto;
- Kendala birokrasi dalam pengajuan kerja sama dengan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah;
- Beberapa lembaga rehabilitasi kesulitan dalam memenuhi standar lembaga rehabilitasi sesuai dengan SNI 8807: 2022.

10. BNNK Magelang

- Layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat belum berjalan optimal karena terkendala kurangnya SDM yang terlatih;
- Tidak ada poli khusus napza sehingga menggunakan poli jiwa untuk melayani pasien Napza;
- Efisiensi penggunaan Sumber Daya (lembaga yang operasional).

Jumlah penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi dapat dilihat dari unit penyelenggara IBM tersebut dapat berjalan sampai layanan IBM selesai atau tidak. Untuk menjalankan unit IBM ada beberapa faktor keberhasilan yang dapat menjadi penunjang yaitu :

1. BNNP Jawa Tengah

- Agen pemulihan mampu menjalankan layanan IBM hingga selesai;

- Agen pemulihan komitmen dalam menjalankan layanan IBM;
 - Agen pemulihan memahami layanan IBM;
 - Pemerintah setempat bersama masyarakat memberi dukungan untuk Unit IBM dalam menjalankan layanan;
 - Klien kooperatif dan memiliki komitmen tinggi dalam mengikuti layanan IBM;
 - Petugas Pendamping IBM melaksanakan asistensi secara massif;
 - Adanya jejaring yang menunjang program IBM.
2. BNNK Cilacap
- Adanya dukungan dan komitmen Kepala Desa untuk melaksanakan program IBM;
 - Adanya dukungan dari masyarakat berupa pemberian makanan dan tempat untuk melaksanakan layanan IBM;
 - Adanya dukungan dari Desa berupa pemberian makanan, Posko, dan spanduk kelengkapan pelaksanaan layanan dan kegiatan IBM.
3. BNNK Kendal
- Adanya keterlibatan dan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam mendukung program IBM;
 - Adanya jejaring dengan *stakeholder* terkait atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program IBM.
4. BNNK Batang
- Adanya dukungan dan komitmen dari Kepala Desa untuk melaksanakan program IBM;
 - Adanya dukungan dari masyarakat berupa pemberian makanan dan tempat untuk melaksanakan layanan IBM;
 - Adanya dukungan dari Desa berupa pemberian makanan, Posko, dan spanduk sebagai kelengkapan pelaksanaan layanan dan kegiatan IBM.
5. BNNK Purbalingga
- AP memiliki pengaruh di desa sehingga dapat melakukan pemetaan dan penjangkauan klien.
6. BNNK Temanggung
- Asistensi maupun Supervisi yang dilakukan secara berkala oleh Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah;
 - Rapat Tim Agen Pemulihan yang dilakukan secara berkala.
7. BNNK Tegal
- Adanya Regulasi berupa Perwal dan Perda.

8. BNNK Banyumas

- Dukungan masyarakat yang aktif.

9. BNNK Surakarta

- Melakukan asistensi secara berkala untuk mengetahui perkembangan layanan;
- Mengadakan rapat tim rutin 1 kali per bulan untuk membahas rencana kegiatan IBM serta mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan;
- Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait.

10. BNNK Magelang

- Melakukan asistensi secara berkala untuk mengetahui perkembangan layanan IBM;
- Mengadakan rapat rutin 1 kali per bulan untuk membahas rencana kegiatan IBM serta mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan;
- Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait;
- Melibatkan keluarga klien dalam layanan IBM.

Target Indikator Kinerja Utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan dalam proses pencapaian target IKU tersebut di atas adalah:

1. BNNP Jawa Tengah

- Agen pemulihan memiliki kesibukan lain/tanggung jawab lain diluar program IBM;
- Agen pemulihan masih membutuhkan pendampingan secara intens saat melaksanakan kegiatan maupun layanan IBM;
- Beberapa agen pemulihan tidak aktif dalam menjalankan program IBM;
- Wilayah IBM terlalu luas, sedangkan jumlah klien yang di targetkan/dianggarkan tidak dapat mencakup seluruh wilayah;
- Kelurahan tidak bisa memberikan anggaran khusus IBM, anggaran yang diberikan berupa anggaran dari program kerja lainnya.

2. BNNK Cilacap

- Kesibukan agen pemulihan dan klien dalam melaksanakan layanan.

3. BNNK Kendal

- Sulitnya mengatur jadwal klien dan jadwal AP dalam pelaksanaan layanan IBM;
- tokoh masyarakat masih enggan menginformasikan karena permasalahan narkoba masih dianggap tabu;
- calon klien merasa takut untuk mengikuti program, masih membutuhkan pendekatan secara personal;

- calon klien merasa tidak membutuhkan layanan IBM; AP dicurigai sebagai informan oleh masyarakat.
4. BNNK Batang
 - Kurangnya perhatian dari Kepala Desa/Lurah selama berlangsungnya program IBM.
 5. BNNK Purbalingga
 - Klien takut mengikuti program IBM dan keluarga yang khawatir terhadap anaknya serta stigma dari masyarakat BNNK Tegal.
 6. BNNK Tegal
 - Tidak adanya dukungan anggaran yang maksimal
 7. BNNK Banyumas
 - AP memiliki beban dari pekerjaannya yang disaat pandemi juga semakin berat sehingga waktu untuk pelaksanaan layanan IBM kurang prioritas, selain itu adanya jam malam di lokasi IBM;
 - Adanya banyak kasus Covid-19 di lokasi IBM sehingga ada batasan dalam kegiatan. Selain itu AP juga terpapar Covid-19 dan menjalani isolasi;
 - Calon klien menjadi sulit dihubungi dan ditemui, bahkan setelah membuat janji kunjungan.
 8. BNNK Surakarta
 - Kesibukan masing-masing Agen Pemulihan dan klien karena memiliki pekerjaan/aktivitas masing-masing;
 - Kurangnya dukungan anggaran dari Kelurahan/Swasta untuk pelaksanaan program IBM.
 9. BNNK Magelang
 - Kesibukan masing-masing Agen Pemulihan dan klien karena memiliki pekerjaan/aktivitas masing-masing.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja untuk pemenuhan target lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah Provinsi memanfaatkan keterbatasan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang sudah tersedia, diantaranya:

1. BNNP Jawa Tengah
 - Melakukan pendampingan (bimbingan) dan penilaian (monev) secara virtual ke lembaga mitra yang tidak dapat dilakukan pendampingan dan penilaian secara langsung/tatap muka.

- Bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan overview terkait materi pelatihan/peningkatan kemampuan dalam bidang adiksi.
2. BNNK Cilacap
 - Menempatkan SDM sesuai dengan latar pendidikan.
 3. BNNK Batang
 - Memanfaatkan SDM dan sarana prasarana yang tersedia di lembaga secara optimal.
 4. BNNK Purbalingga
 - Lembaga mitra yang operasional dapat memberikan layanan dengan Sumber Daya yang tersedia.
 5. BNNK Surakarta
 - Menggunakan poli jiwa untuk melayani pasien Napza
 - Menggunakan bangsal kelas 1 yang berkapasitas 1 pasien dan hanya menjalankan program detoksifikasi.
 6. BNNK Magelang
 - Menggunakan poli jiwa untuk melayani pasien Napza.

Jumlah penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi dapat terpenuhi/dapat diukur setelah layanan IBM selesai sampai pada tahapan akhir. Capaian kinerja untuk pemenuhan target Jumlah penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi memanfaatkan keterbatasan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang sudah tersedia, diantaranya:

1. BNNP Jawa Tengah
 - Agen pemulihan mengatur jadwal kerjanya dalam melaksanakan program IBM agar tidak tumpang tindih dengan program lain;
 - Petugas pendamping IBM melakukan asistensi dan evaluasi program IBM setiap minggunya;
 - Agen pemulihan melakukan pembagian tugas untuk melaksanakan program IBM;
 - Memprioritaskan klien IBM yang berasal dari daerah yang cukup rawan;
 - Bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan dalam pelaksanaan program IBM.
2. BNNK Cilacap
 - Penunjukan agen pemulihan yang selektif.

3. BNNK Batang

- Unit IBM yang telah terbentuk menggunakan anggaran dari BNN untuk operasional;
- Unit IBM yang telah terbentuk menggunakan anggaran dari Desa untuk melaksanakan kegiatan IBM;
- Tidak ada penambahan unit IBM
- Adanya SK IBM dan AP.

4. BNNK Purbalingga

- Penunjukan personil sebagai petugas pendamping IBM.

Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja

Guna mengatasi hambatan yang ada, maka di tahun 2025 perlu adanya upaya:

1. Perlunya koordinasi dengan Instansi terkait (Dinsos, Dinkes) terkait evaluasi pemberian ijin kepada lembaga mitra;
2. Perlunya menjaring/mengevaluasi lembaga yang akan bermitra dengan BNNP maupun BNNK;
3. Perlunya melaksanakan asistensi dan sharing pengetahuan ke lembaga mitra secara masif;
4. Perlunya membuat kesepakatan dengan klien diluar jadwal dan menghubungi keluarga/mengingatkan klien tentang jadwal rehab;
5. Perlunya memberikan informasi/pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya narkoba dan program rehabilitasi;
6. Perlunya perbaikan kelengkapan SOP di lembaga rehabilitasi;
7. Perlunya penambahan pelatihan/peningkatan kemampuan SDM dibidang adiksi.

Selain upaya-upaya tersebut, dapat dilakukan beberapa inovasi untuk mengoptimalkan pencapaian lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah Provinsi diantaranya :

1. Kerjasama dengan beberapa lembaga/instansi seperti:
 - a. Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan *overview* peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di bidang penanganan adiksi;
 - b. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan terkait evaluasi pelaksanaan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik Instansi Pemerintah maupun Komponen Masyarakat;
 - c. Instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian Standar Nasional Indonesia terkait penilaian ke lembaga mitra yang diusulkan SNI regular;
 - d. Mengajukan lembaga mitra BNNK dalam penilaian SNI.

2. Melaksanakan *overview* materi pelatihan/peningkatan kemampuan terkait adiksi yang sudah dilatih kepada petugas rehabilitasi yang belum mengikuti pelatihan.

Guna mengatasi hambatan yang ada, maka di tahun 2025 perlu adanya upaya:

1. Perlunya pendampingan yang dilakukan oleh petugas BNNP/BNNK kepada agen pemulihan dalam melaksanakan layanan IBM dan pengisian buku kegiatan maupun buku pemulihan;
2. Perlu adanya komitmen agen pemulihan dan pemerintah Desa/Kelurahan dalam menjalankan program IBM secara maksimal;
3. Perlunya dukungan keluarga klien;
4. Perlunya melakukan evaluasi tentang tugas, fungsi dan tanggungjawab agen pemulihan;
5. Perlunya mensosialisasikan program IBM agar tokoh masyarakat tidak lagi takut akan adanya program IBM;
6. Perlunya melakukan pendekatan secara personal kepada klien IBM;
7. Perlu adanya dukungan dari *stakeholder* dan masyarakat;
8. Perlunya menyusun timeline kegiatan dan layanan IBM.

Selain upaya tersebut, dapat dilakukan beberapa inovasi untuk mengoptimalkan pencapaian penyelenggara layanan IBM yang terlatih diantaranya:

1. Kerjasama dengan beberapa lembaga/instansi seperti :
 - a. Balai Besar Pelatihan Vokasional Produktivitas (BBPVP) Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengembangan diri klien dalam rangka bina lanjut program pasca rehabilitasi (pelatihan kerja);
 - b. Sentra Terpadu Kartini Kementerian Sosial terkait pembinaan kewirausahaan bagi klien;
 - c. Dinas Pembrdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah terkait penanganan untuk klien perempuan dan anak yang terlibat dengan kekerasan;
 - d. Lembaga/Instansi penyedia layanan kejar paket terkait kebutuhan klien akan pendidikan;
 - e. Puskesmas/Rumah Sakit terkait rujukan untuk masalah kesehatan klien;
 - f. Rumah Sakit yang menyediakan layanan rehabilitasi/Lembaga rehabilitasi terkait rujukan rawat inap layanan rehabilitasi;
 - g. Dinas Pendidikan setempat/Sekolah terkait penanganan rehabilitasi klien yang masih sekolah.

- h. Pendamping IBM dari BNNP/BNNK membuat grup melalui aplikasi Whatsapp untuk mempermudah pendampingan/komunikasi dengan agen pemulihan.

8 Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,42	3,62	105,84%

Tabel 25
INDEKS KEPUASAN LAYANAN KLINIK REHABILITASI BNN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	3,42	3,62	105,48%
2022	3,34	3,67	109,88%
2023	3,4	3,48	102,58%
2024	3,2	3,6	112,5%

Definisi Operasional

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi pada fasilitas Rehabilitasi BNN adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (klien, keluarga klien, dan masyarakat setempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode Pengukuran

Adapun pengukuran indikator “Indeks kepuasan layanan rehabilitasi pada fasilitas Rehabilitasi BNN” diukur dengan cara survei kepada klien, keluarga klien dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah.

Hasil

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah klien, keluarga klien atau masyarakat mendapatkan layanan yang optimal dan sesuai kebutuhannya dari fasilitas rehabilitasi milik BNN, sehingga klien, keluarga klien atau masyarakat dapat memberikan penilaian yang baik saat dilakukan pengisian form indeks kepuasan layanan. Pemenuhan target sudah tercapai, berikut rincian sebaran target dan capaian di masing–masing wilayah:

Tabel 26
INDEKS KEPUASAN LAYANAN REHABILITASI BNNP DAN BNNK TAHUN 2021-2024

SATUAN KERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
BNNP Jawa Tengah	3,20	3,60	3,40	3,338	3,34	3,59	3,42	3,70
BNNK Cilacap	3,20	3,50	3,20	2,967	3,4	3,86	3,60	3,60
BNNK Kendal	3,20	3,20	3,20	3,325	3,4	3,59	3,42	3,53
BNNK Batang	-	-	3,20	3,792	3,4	3,91	3,60	3,65
BNNK Purbalingga	3,20	3,60	3,20	3,370	3,4	3,65	3,42	3,57
BNNK Temanggung	3,20	3,60	3,20	3,842	3,4	3,91	3,77	3,82
BNNK Tegal	3,20	3,40	3,20	3,271	3,4	3,46	3,29	3,41
BNNK Banyumas	3,20	3,54	3,20	3,488	3,4	3,88	3,89	3,90
BNNK Surakarta	3,20	3,383	3,20	3,553	3,4	3,67	3,42	3,53
BNNK Magelang	-	-	3,20	3,459	3,4	3,69	3,40	3,52

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi pada fasilitas Rehabilitasi BNN secara keseluruhan capaiannya meningkat. Target dan Capaian BNNP dan BNNK setiap tahunnya meningkat hal ini dikarenakan klien sudah merasakan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, hanya saja ada 1 BNNK yang tidak dapat memenuhi target pada tahun ini yaitu BNNK Cilacap, hal ini dikarenakan retensi klien datang cukup rendah. Untuk pemenuhan capaian tersebut, didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya:

Tabel 27
SEBARAN TARGET DAN CAPAIAN KLIEN YANG MENGAKSES LAYANAN REHABILITASI MILIK BNNP DAN BNNK TAHUN 2021

SATUAN KERJA	TARGET	CAPAIAN	SELESAI PROGRAM	RUJUK	DO	BINA LANJUT
BNNP Jawa Tengah	50	52	33	4	15	40
BNNK Cilacap	15	41	28	6	7	6
BNNK Kendal	18	30	30	0	0	18
BNNK Batang	20	25	18	4	3	13
BNNK Purbalingga	20	33	24	1	8	22
BNNK Temanggung	10	10	6	4	0	0
BNNK Tegal	15	15	15	0	0	15
BNNK Banyumas	30	46	17	0	26	20
BNNK Surakarta	20	25	19	1	5	0
BNNK Magelang	20	20	20	0	0	0
TOTAL	218	297	210	20	64	116

Tabel 28
SEBARAN TARGET DAN CAPAIAN KLIEN YANG MENGAKSES LAYANAN
REHABILITASI MILIK BNNP DAN BNNK TAHUN 2022

SATUAN KERJA	TARGET	CAPAIAN	SELESAI PROGRAM	RUJUK	DO	BINA LANJUT
BNNP Jawa Tengah	60	70	27	2	11	0
BNNK Cilacap	15	21	11	0	5	10
BNNK Kendal	15	18	18	0	0	16
BNNK Batang	15	35	12	1	2	12
BNNK Purbalingga	20	27	23	1	3	20
BNNK Temanggung	10	22	4	4	0	4
BNNK Tegal	15	15	15	0	0	15
BNNK Banyumas	35	46	25	3	12	10
BNNK Surakarta	20	22	5	1	3	7
BNNK Magelang	20	35	33	1	1	17
TOTAL	225	311	173	13	37	111

Tabel 29
SEBARAN TARGET DAN CAPAIAN KLIEN YANG MENGAKSES LAYANAN
REHABILITASI MILIK BNNP DAN BNNK TAHUN 2023

SATUAN KERJA	TARGET	CAPAIAN	SELESAI PROGRAM	RUJUK	DO	BINA LANJUT
BNNP Jawa Tengah	65	78	24	2	20	24
BNNK Cilacap	20	24	20	2	2	15
BNNK Kendal	10	13	13	0	0	13
BNNK Batang	15	26	19	1	6	23
BNNK Purbalingga	20	23	23	1	1	19
BNNK Temanggung	10	28	10	8	10	10
BNNK Tegal	15	15	14	0	0	9
BNNK Banyumas	20	33	9	7	5	7
BNNK Surakarta	20	20	8	2	0	10
BNNK Magelang	20	45	37	2	6	29
TOTAL	215	305	177	25	50	159

Tabel 30
SEBARAN TARGET DAN CAPAIAN KLIEN YANG MENGAKSES LAYANAN
REHABILITASI MILIK BNNP DAN BNNK TAHUN 2024

SATUAN KERJA	TARGET	CAPAIAN	SELESAI PROGRAM	RUJUK	DO	BINA LANJUT
BNNP Jawa Tengah	54	85	41	15	12	17
BNNK Cilacap	20	27	24	0	3	15
BNNK Kendal	10	14	14	0	0	14
BNNK Batang	15	33	25	1	4	15
BNNK Purbalingga	20	27	16	0	6	15
BNNK Temanggung	10	10	6	4	0	0
BNNK Tegal	15	18	18	0	0	15
BNNK Banyumas	20	53	13	5	7	15
BNNK Surakarta	20	29	22	2	0	10
BNNK Magelang	20	36	24	1	7	16
TOTAL	204	332	203	28	39	132

Berdasarkan data di atas terjadi peningkatan jumlah klien yang mengaksaes layanan rehabilitasi di Klinik milik BNNP dan BNNK di setiap tahunnya, hal ini dapat menguatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BNN juga meningkat.

Tabel 31
SEBARAN TARGET DAN CAPAIAN LAYANAN
SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOTIKA (SKHPN)
TAHUN 2021-2024

SATUAN KERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
BNNP Jawa Tengah	0	199	750	634	269	269	400	720
BNNK Cilacap	83	83	100	109	100	102	135	145
BNNK Kendal	117	130	300	320	300	348	475	494
BNNK Batang	145	198	400	316	200	288	300	300
BNNK Purbalingga	100	100	150	153	150	150	173	185
BNNK Temanggung	0	78	100	100	60	71	100	124
BNNK Tegal	75	75	100	108	75	88	150	150
BNNK Banyumas	265	366	250	230	310	318	225	231
BNNK Surakarta	0	15	300	280	255	261	207	225
BNNK Magelang	0	267	260	303	250	265	325	244
TOTAL	785	1511	2710	2553	1969	2160	2490	2818

Tabel 32
SEBARAN TARGET DAN CAPAIAN LAYANAN EVALUASI PSIKOLOGI TIPE A DAN TIPE B
BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2022 S.D 2024

TAHUN	EVALUASI PSIKOLOGI TIPE A		EVALUASI PSIKOLOGI TIPE B	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2022	5	0	5	2
2023	5	0	5	2
2024	5	0	5	4

Selain target Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi, baik BNNP maupun BNNK memiliki target Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR). IKR mengukur kualitas lembaga rehabilitasi. Berikut sebaran target dan capaiannya:

Tabel 33
SEBARAN CAPAIAN INDEKS KAPABILITAS
REHABILITASI (IKR) TAHUN 2023-2024

SATUAN KERJA	TAHUN 2023	TAHUN 2024
BNNP Jawa Tengah	3,87	4,00
BNNK Cilacap	3,50	3,62
BNNK Kendal	3,46	3,49
BNNK Batang	3,33	3,61
BNNK Purbalingga	3,80	3,49
BNNK Temanggung	3,62	4,00
BNNK Tegal	3,57	3,63
BNNK Banyumas	3,28	3,75
BNNK Surakarta	3,70	3,90
BNNK Magelang	3,80	3,53
Se-Jawa Tengah	3,57	3,70

Selain beberapa kegiatan tersebut, BNNP dan BNNK bermitra dengan Lapas dan Bapas dalam memberikan layanan rehabilitasi dari Tahun 2021 s.d 2024. Kegiatan

yang diberikan berupa asesmen, konseling individu, konseling kelompok dan pertemuan keluarga. BNNP dan BNNK juga bekerjasama dengan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan intervensi lapangan.

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi pada fasilitas Rehabilitasi BNN tersebut dapat berjalan sampai layanan IBM selesai atau tidak. Untuk menjalankan unit IBM ada beberapa faktor keberhasilan yang dapat menjadi penunjang yaitu :

1. BNNP Jawa Tengah

- Adanya dukungan anggaran;
- Adanya sarana prasarana yang mendukung;
- SDM berkompentensi dan memberikan layanan sesuai dengan standar;
- Layanan gratis dan terinformasikan kepada klien, keluarga klien dan masyarakat;
- Mekanisme layanan mudah;
- Waktu layanan sesuai dengan kebutuhan klien;
- Komunikasi yang efektif dari Petugas kepada klien;
- Beberapa klien kooperatif mengikuti program rehabilitasi berkelanjutan hingga akhir.

2. BNNK Cilacap

- Layanan rehabilitasi yang menyesuaikan kondisi klien dan kebutuhan terkait waktu dan pelaksanaan.

3. BNNK Kendal

- Petugas melakukan asistensi dalam pengisian IKM.

4. BNNK Batang

- Adanya petugas terlatih dalam memberikan layanan rehabilitasi;
- Adanya petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan fisik dan pemberian obat;
- Petugas memberikan pelayanan secara ramah dan sesuai SOP;
- Sarana dan prasarana klinik cukup memadai.

5. BNNK Purbalingga

- Melakukan pendampingan dalam pengisian survei kepuasan layanan.

6. BNNK Temanggung

- Tingkat kompetensi petugas;
- Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai peraturan yang berlaku;
- Monitoring dan Evaluasi berkala sistem, mekanisme dan SOP.

7. BNNK Banyumas

- Komitmen penyalah guna dalam mengikuti rehabilitasi;
- Petugas yang kompeten dalam mendampingi penerima layanan rehabilitasi.

8. BNNK Surakarta

- Melakukan pendampingan pada saat klien melakukan pengisian kuesioner IKM;
- SDM klinik pratama rehabilitasi BNNK Surakarta cukup lengkap dan sudah mendapatkan pelatihan dasar adiksi;
- Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta sudah mendapatkan rekomendasi SNI Tipe III pada tahun 2022 dan tetap mempertahankan layanan sesuai standar;
- Tahun 2024, Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras telah mendapatkan penilaian akreditasi Paripurna dari Kementerian Kesehatan;
- Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras memberikan layanan sesuai SOP dan panduan yang telah ditetapkan.

9. BNNK Magelang

- Melakukan pendampingan pada saat klien melakukan pengisian kuesioner.

Target Indikator Kinerja Utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan yang dihadapi dalam proses pencapaian target IKU tersebut diantaranya:

1. BNNP Jawa Tengah

- Beberapa klien berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi BNNP Jawa Tengah (luar kota) sehingga klien kesulitan untuk mengakses layanan;
- Karakteristik klien berbeda-beda (pemahaman, tingkat pendidikan, komunikasi).

2. BNNK Cilacap

- Retensi Klien datang cukup rendah tidak sesuai dengan jadwal.

3. BNNK Kendal

- Responden/klien kurang memahami dalam pengisian instrumen sehingga petugas harus melakukan pendampingan untuk menjelaskan maksud dari kuesioner
- Klien tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam mengisi survei.

4. BNNK Surakarta

- Survei dilakukan secara online, sehingga ada kendala berupa koneksi internet dan beberapa klien kurang memahami bagaimana mengisi kuesioner secara online;
- Beberapa pertanyaan kuesioner IKM agak kurang dapat dipahami.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi pada fasilitas Rehabilitasi BNN dapat terpenuhi/dapat diukur setelah klien mendapatkan layanan rehabilitasi secara optimal dan klien melaksanakan pengisian formulir Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian kinerja untuk pemenuhan target Indeks kepuasan layanan rehabilitasi pada fasilitas Rehabilitasi BNN memanfaatkan keterbatasan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang sudah tersedia, diantaranya:

1. BNNP Jawa Tengah

- Pelaksanaan rehabilitasi melalui virtual (*Telecounseling*)
- Memaksimalkan sumber daya yang ada sesuai kebutuhan klien.

2. BNNK Banyumas

- BNN Kabupaten Banyumas memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh petugas rehabilitasi BNN Kabupaten Banyumas untuk memenuhi target indikator kinerja kegiatan

Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja

Guna mengatasi hambatan yang ada, maka di tahun 2025 perlu adanya upaya:

1. Perlunya adanya membuat inovasi layanan jarak jauh;
2. Perlu adanya pendampingan kepada klien dan membangun komunikasi efektif;
3. Perlunya memperkuat kerja tim dalam pelayanan rehabilitasi serta melakukan pengusulan agar petugas mendapatkan peningkatan kemampuan;
4. Beberapa BNNK perlu adanya perbaikan sarana prasarana Klinik untuk meningkatkan kenyamanan penerima layanan;
5. Petugas memberikan penjelasan yang mudah untuk dipahami responden dalam pengisian kuesioner;
6. Meyediakan sarpras penunjang dalam mengisi survei (menyediakan komputer untuk pengisian survei);
7. Perlu adanya koordinasi kelembagaan;
8. Perlu adanya peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi dalam bidang adiksi;
9. Perlu adanya perbaikan kelengkapan SOP di Lembaga rehabilitasi

Selain upaya tersebut, dapat dilakukan beberapa inovasi untuk mengoptimalkan pencapaian penyelenggara layanan IBM yang terlatih diantaranya:

1. *Telecounseling* untuk klien yang jarak jauh;
2. Mempeluas jejaring untuk memenuhi permasalahan/kebutuhan klien seperti:
 - a. Balai Besar Pelatihan Vokasional Produktivitas (BBPVP) Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengembangan diri klien dalam rangka bina lanjut program pasca rehabilitasi (pelatihan kerja);
 - b. Sentra Terpadu Kartini Kementerian Sosial terkait pembinaan kewirausahaan bagi klien;
 - c. Dinas Pembrdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah terkait penanganan untuk klien perempuan dan anak yang terlibat dengan kekerasan;
 - d. Lembaga/Instansi penyedia layanan kejar paket terkait kebutuhan klien akan pendidikan;
 - e. Puskesmas/Rumah Sakit terkait rujukan untuk masalah kesehatan klien;
 - f. Rumah Sakit yang menyediakan layanan rehabilitasi/Lembaga rehabilitasi terkait rujukan rawat inap layanan rehabilitasi;
 - g. Dinas Pendidikan setempat/Sekolah terkait penanganan rehabilitasi klien yang masih sekolah.

9 Sasaran Strategis Meningkatkan pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
9	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta jaringan	100%

Tabel 34

JUMLAH JARINGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA YANG BERHASIL DIPETAKAN

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	2	2	100%
2022	1	1	100%
2023	1	1	100%
2024	1	1	100%

Definisi Operasional

Melakukan pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah tupoksi Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah. Dalam

melaksanakan tupoksi tersebut, Seksi Intelijen menggunakan berbagai macam metode guna mendapatkan Peta Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Metode yang digunakan antara lain adalah pengumpulan bahan, keterangan informasi, dan menerima laporan informasi dari masyarakat langsung maupun melalui *call center* BNN dan lain sebagainya.

Dari berbagai informasi yang didapatkan, Seksi Intelijen melakukan pengolahan dan analisa baik secara penyelidikan manual atau analisis intelijen berbasis teknologi dari unsur-unsur keterangan. Apabila unsur-unsur keterangan dapat dipertanggung jawabkan, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti Seksi Intelijen BNN Provinsi Jawa Tengah dengan membentuk Tim Intelijen untuk melakukan penyelidikan kepada Target oleh tim BNNP Jateng yang melibatkan anggota bidang pemberantasan BNNK se-Jawa Tengah yang berada di wilayah yang telah di-*profiling* tersebut.

Dalam melakukan penyelidikan, Tim Intelijen melakukan penyamaran, *profiling*, pembuntutan dan lain-lain untuk mengetahui seluruh informasi mengenai target. Seluruh informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan rencana dan cara bertindak sehingga memberikan hasil yang optimal. Penggunaan alat baru yaitu *Direction Finder* cukup memberi kemudahan untuk akurasi lokasi tersangka dengan cepat sehingga lebih memudahkan menemukan target secara presisi.

Hasil

Hasil yang dicapai oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah adalah melakukan ungkap kasus dan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selama Januari-Desember 2024 Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah berhasil melakukan 15 kali ungkap kasus kasus narkotika dengan 23 tersangka tindak pidana narkotika

Kendala

Kendala yang dihadapi oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja tim analis (contohnya pelatihan khusus analisis) dan juga kurangnya akses kerjasama yang lebih mudah dengan provider-provider juga meningkatnya penggunaan sosial media sebagai sarana komunikasi yg sulit terdeteksi

Strategi

Strategi yang dilakukan oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah dalam melakukan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah dengan melakukan pendekatan, penggalangan kepada provider-provider, TNI,

POLRI, Bea Cukai, Kantor Pos, instansi-intansi pemerintahan, dan seluruh lapisan masyarakat.

10

Sasaran
Strategis

Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
10	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	17 Berkas Perkara	*23 Berkas Perkara	135%

*19 berkas perkara BNNP Jateng Tahun 2024, 4 berkas perkara Tahun 2023 yang P-21 Tahun 2024.

Tabel 35

JUMLAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA YANG P-21

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	19	26	137%
2023	20	21	105%
2024	17	23	135%

Definisi Operasional

Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. Sedangkan penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika adalah penanganan kasus yang dimulai dari pemetaan dan penelusuran transaksi keuangan dan aset harta kekayaan, penyelidikan, penyitaan aset, penyidikan sampai pada tahapan pemberkasan perkara TPPU yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21). Proses penyidikan dalam kelengkapan berkas perkara dilakukan mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai proses penyerahan berkas perkara dan tersangka kepada Kejaksaan.

Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. Sedangkan untuk berkas penyidikan TPPU pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan data seluruh berkas perkara TPPU dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang

ditangani dengan data capaian penyelesaian seluruh berkas perkara TPPU dari hasil tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Hasil

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang ditangani oleh BNNP Jateng yang sudah P-21 periode Januari s.d Desember 2024 sebanyak 23 (dua puluh tiga) berkas tersangka dan masih ada 1 (satu) berkas tersangka yang masih dalam proses penyidikan. BNNP Jawa Tengah tahun 2024 ini tidak melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, dan untuk BNN Kab/Kota pada tahun 2024 tidak melakukan proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika.

Adapun untuk rincian penanganan berkas perkara tindak pidana narkotika sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 36
DATA LAPORAN KASUS NARKOTIKA BNNP DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2024

NO	SATKER	LKN	BERKAS	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
1	BNNP JAWA TENGAH	LKN /0001-NAR/1/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	AKHIRUL SHIDIQ ENDRA RIFAIZ Als ENDRO Bin RUSMANTO	P21	Januari 2024	Mei 2024
		LKN /0002-NAR/1/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO	P21	Januari 2024	Mei 2024
			Berkas 2	ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO	P21	Januari 2024	Mei 2024
			Berkas 3	MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO	P21	Januari 2024	Mei 2024
			Berkas 4	DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO	P21	Januari 2024	Mei 2024
		LKN /0003-NAR/1/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	ANANG PURNAMA Alias GONDRONG Bin MULYANTO (Alm)	P21	Januari 2024	Mei 2024

NO	SATKER	LKN	BERKAS	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
		LKN /0004-NAR/I/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	MUZAKKI Bin HAMIM (Alm)	P21	Januari 2024	Mei 2024
		LKN /0005-NAR/II/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	DWIYAN CHRISTANUGRAHA Alias YAYAN Anak Dari CHRISWINOTO	P21	Februari 2024	Juni 2024
		LKN /0006-NAR/II/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	MOHAMMAD RYAN WIBOWO Alias PAW Bin BAMBANG WINARTO	P21	Februari 2024	Juni 2024
		LKN /0007-NAR/II/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	A. GILANG PUTRA PRATAMA Bin MARZUWAN	P21	Februari 2024	Mei 2024
			Berkas 2	MAYZA SAPUTRA Bin SULIMIN	P21	Februari 2024	Juni 2024
			Berkas 3	ARIF MADANI Bin ARIFIN MA'ARIF	P21	Februari 2024	Juni 2024
		LKN /0008-NAR/II/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	LOST & FOUND	-	Februari 2024	-
		LKN /0009-NAR/V/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	AGUS PRIYONO Bin LEGIMAN SUGIARTO (Alm)	P21	Mei 2024	Juli 2024
		LKN /0010-NAR/V/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	SATUMAN Als SADOMAN Bin MAWI (Alm)	P21	Mei 2024	September 2024
		LKN/0011-NAR/V/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	YUSAK JEFFRY SURYADI KRISTONO Als CIDUK Anak Dari PAULUS KRISTONO	P21	Mei 2024	Agustus 2024
			Berkas 2	TANTOWI DJAUHARI Als TOWIK Bin PINTEN SASTRO WALUYO (Alm)	P21	Mei 2024	Agustus 2024

NO	SATKER	LKN	BERKAS	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
		LKN/0012-NAR/VI/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	EDY PRASETYA Als BAGAS Bin AGUS ARIF BINTORO (Alm)	P21	Juni 2024	September 2024
		LKN/0013-NAR/IX/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	MUHAMMAD ROZIKIN Als SINTE Bin JUPRI	P21	September 2024	Oktober 2024
		LKN/0014-NAR/X/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	GARDIAN NUSANTARA FAHMI Bin FAHMI (Alm)	P21	Oktober 2024	Desember 2024
		LKN/0015-NAR/X/2024/BNNP Jawa Tengah	Berkas 1	MUH. SHOFIULLOH Als OPI Als PILUS Bin MUSTOFA AMIN	Tahap I	Oktober 2024	-

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan BNN Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan lancar mulai dari pemeriksaan terhadap Tersangka maupun saksi-saksi di tingkat penyidikan sampai proses penyerahan berkas perkara dan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan setempat. Hambatan yang muncul dalam proses pengembangan penyidikan terhadap atasan/bos tersangka menemui kesulitan karena penggunaan sosial media (*WhatsApp*, Instagram, Facebook, dll) sebagai alat komunikasi yang menghambat deteksi komunikasi tersangka dengan atasannya sehingga dalam 1 (satu) Jaringan antar tersangka tidak mengenal/bertemu secara fisik.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai kinerja, BNNP Jawa Tengah mengoptimalkan SDM dan anggaran yang ada, dimana saat ini BNNP Jawa Tengah memiliki Penyidik sejumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) Penyidik Madya, 4 (empat) Penyidik BNN Ahli Muda, dan 2 (dua) Penyidik BNN Ahli Pertama. Sedangkan untuk anggaran penyelidikan dan penyidikan menggunakan anggaran yang bersumber dari DIPA BNN.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Strategi upaya perbaikan atau penyempurnaan kinerja ke depannya di tahun 2025 adalah dengan meningkatkan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait dalam menunjang kelancaran penyelesaian proses berkas perkara baik itu di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Laboratorium

Forensik ataupun instansi lainnya, juga peningkatan kemampuan bagi personil lapangan maupun penyidik.

11 Sasaran Strategis Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100%

Tabel 37

NILAI TINGKAT KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN TAHANAN

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	100	100	100%
2022	100	100	100%
2023	100	100	100%
2024	100	100	100%

Tabel 38

NILAI TINGKAT KEAMANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN NON NARKOTIKA

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	100	100	100%
2022	100	100	100%
2023	100	100	100%
2024	100	100	100%

Definisi Operasional

Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban Dan Kesehatan Tahanan

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah:

- Melaksanakan perawatan terhadap tersangka yang ditahan di BNNP Jateng dalam kasus P4GN.
- Melaksanakan pengawasan dalam waktu 1x24 jam selama tersangka ditahan di BNNP Jateng.
- Melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka yang ditahan di BNNP Jateng secara berkala terhadap tahanan dari peralatan mandi, pakaian dan keperluan yang lain.
- Pemberian kebutuhan makanan dan minuman (3x/hari) secara rutin.
- Melaksanakan sidak terhadap tahanan yang ditahan di BNNP Jateng.

Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika Dan Non Narkotika

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah:

- a. Melaksanakan pendataan, pengamanan dan pengawasan barang bukti berupa narkotika dan non narkotika.
- b. Melaksanakan penyimpanan barang bukti narkotika dalam almari brankas.
- c. Melaksanakan pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh instansi terkait (Balai POM, Kejaksaan, Puslabfor Polri, Ditresnarkoba dan Dinas Kesehatan)

Metode Pengukuran

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:

1. Indikator kinerja pertama adalah nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan dengan nilai target 100 setiap tahunnya 2020-2024.
2. Indikator kinerja kedua adalah nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika dengan target nilai 100 setiap tahunnya 2020-2024.

Hasil

Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban Dan Kesehatan Tahanan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan dengan nilai target 100.

Pada periode bulan Januari s.d Desember 2024, kegiatan yang telah dilaksanakan sie Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas pengiriman tersangka guna penitipan selama proses penyidikan.
- b. Melaksanakan tugas pengambilan tersangka guna penyerahan tersangka dan BB kepada JPU.
- c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada semua tahanan.
- d. Melaksanakan pengawasan selama tersangka ditahan di BNNP Jateng

Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika Dan Non Narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika dengan nilai target 100. Pada periode bulan Januari s.d Desember 2024, kegiatan yang telah dilaksanakan sie Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas pengawalan dan pengiriman BB Narkotika dalam proses penyidikan
- b. melaksanakan tugas pengawalan dan pengiriman BB Narkotika dalam proses penyidikan
- c. melaksanakan tugas pengamanan BB dlm proses penimbangan BB Narkotika guna penimbangan BB.

- d. melaksanakan 6 kali pemusnahan BB Narkotika selama Januari s.d Desember 2024.
- e. melakukan pendataan barang bukti.

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Faktor Pendukung keberhasilan:

- a. Terlaksananya pengawasan tahanan melalui piket jaga tahanan harian yang dilaksanakan oleh personil bidang pemberantasan
- b. Terlaksananya pengawasan barang bukti narkotika melalui pengecekan rutin oleh Tim pengelola barang bukti.
- c. Terjalinya koordinasi dan sinergi yang baik dengan instansi /lembaga terkait, Laboratorium forensik, Badan Metrologi, Poliklinik/Rumah Sakit, Lapas/Rutan (Kemenkumham), Polri dan Kejaksaan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Faktor pendukung kegagalan:

- a. Pelaksanaan pengawasan tahanan melalui piket jaga tahanan harian yang dilaksanakan oleh personil bidang pemberantasan tidak berjalan dengan baik
- b. Pelaksanaan pengawasan barang bukti narkotika melalui pengecekan rutin oleh Tim pengelola barang bukti tidak berjalan dengan baik.
- c. koordinasi dan sinergi yang belum terjalin dengan baik (maksimal) dengan instansi/lembaga terkait, Laboratorium forensik, Badan Metrologi, Poliklinik/Rumah Sakit, Lapas/Rutan (Kemenkumham), Polri dan Kejaksaan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Kendala

- a. Dalam melaksanakan perawatan, pengawasan tahanan sarana dan prasarannya serba terbatas, khususnya petugas jaga.
- b. Medis yang ada di BNNP Jateng kurang cepat dalam menangani tahanan apabila mengalami gangguan kesehatan karena belum ada dokter khusus yang menangani tahanan.
- c. Banyaknya permintaan Layanan Asesmen Terpadu (TAT) yang melebihi target anggaran. Target awal tahun 40 layanan. Sudah melayani 184 layanan.
- d. Kurangnya personel Pengawas Barang bukti di BNNP Jateng, sehingga pengawasannya masih dibantu oleh personel dari lain seksi khususnya sta

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN
PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2024**

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	55.51	36.43	91.94
2	BNNP Jawa Timur	53.21	34.98	88.19
3	BNNP Nusa Tenggara Barat	51.47	36.59	88.06
4	BNNP Sumatera Selatan	51.24	36.26	87.50
5	BNNP Sulawesi Selatan	49.82	36.90	86.72
6	BNNP Jawa Tengah	51.31	34.97	86.28
7	BNNP Bali	49.75	36.52	86.27
8	BNNP Kalimantan Selatan	50.66	34.86	85.52
9	BNNP Kalimantan Tengah	49.97	35.03	85.00
10	BNNP Lampung	50.42	34.53	84.95
11	BNNP Sumatera Barat	51.49	31.83	83.32
12	BNNP Banten	47.17	35.92	83.09
13	BNNP Jawa Barat	48.79	34.24	83.03
14	BNNP Sulawesi Barat	46.53	34.53	81.06
15	BNNP Kepulauan Riau	43.82	36.63	80.45
16	BNNP Sumatera Utara	45.59	34.44	80.03
17	BNNP Papua Barat	45.32	34.48	79.80
18	BNNP Kalimantan Timur	43.10	36.34	79.44
19	BNNP Riau	41.80	34.04	75.84
20	BNNP Maluku	43.62	32.05	75.67
21	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	39.30	35.99	75.29
22	BNNP Kalimantan Barat	40.72	34.33	75.05
23	BNNP Sulawesi Tenggara	41.54	33.50	75.04
24	BNNP DKI Jakarta	41.77	33.26	75.03
25	BNNP Aceh	41.74	33.28	75.02
26	BNNP Sulawesi Utara	31.94	36.87	68.81

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

f sie penyidik dan staf intelijen.

- e. Belum adanya ruangan khusus yang digunakan untuk pengamanan dan penyimpanan brankas barang bukti.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada awal tahun 2024, terdapat pengurangan anggaran (*Automatic Adjustment*) pada komponen anggaran Makan Tahanan. Namun tidak ada kendala dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Hal tersebut disiasati dengan mendorong adanya sinergi dengan *stakeholder* terkait.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Adapun upaya perbaikan atau penyempurnaan kinerja ke depannya, yaitu:

- a. Berupaya untuk berkoordinasi dengan Laboratorium forensik, Badan Metrologi, Poliklinik/Rumah Sakit, Lapas/Rutan (Kemenkumham), Polri dan Kejaksaan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- b. Pelaksanaan piket jaga tahanan harian oleh semua anggota bidang pemberantasan di bantu anggota k-9 dan *security*.
- c. Mengajukan permohonan usulan penambahan anggaran Layanan Asesmen Terpadu (TAT) untuk ditahun berikutnya 2025.
- d. Mengajukan permohonan ke bagian umum agar dapat dibuatkan ruangan khusus penyimpanan barang bukti.
Berupaya untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri/Tinggi, Pengadilan Negeri/Tinggi dan Lapas demi kelancaran

12

Sasaran Strategis Meningkatkan proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	78 Indeks	98,00 Indeks	125,64%
13	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2 BNN Kabupaten/ Kota	9 BNN Kabupaten/ Kota	450%

Definisi Operasional

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada

keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Metode Pengukuran

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh Berdasarkan hasil Evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kementerian Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui system informasi Kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran merupakan gabungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memiliki dua komponen yaitu:

1. Efektifitas – Capaian Rincian Output (RO);
2. Efisiensi – Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.

Sementara Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran memiliki tiga komponen yaitu:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran
 - a. Revisi DIPA;
 - b. Deviasi Halaman III DIPA.
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran;
 - b. Belanja Kontraktual;
 - c. Penyelesaian Tagihan;
 - d. Pengelolaan UP dan TUP.
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
 - a. Capaian Output.

Hasil

Gambar 3
CAPAIAN NKA TAHUN 2024

The screenshot shows a web interface for monitoring budget performance. The title is 'Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja'. The interface includes a search bar, a table with columns for 'No.', 'Kode Satuan Kerja', 'Satuan Kerja', 'NK Perencanaan Anggaran', 'NK Pelaksanaan Anggaran', and 'Nilai Kinerja Anggaran'. The data row shows a value of 96,78 for planning and 99,22 for execution, resulting in a total performance of 98,00. A 'Download Excel' button is visible in the top right corner.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	96,78	99,22	98,00

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MOVEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-10 10:14:34

Pada tahun 2024 realisasi NKA BNNP Jawa Tengah melampaui capaian dari target 78 mencapai 98 atau 125,64%. Yang terdiri dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 96,78 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 99,22.

Kualitas Keberhasilan

Peningkatan signifikan pada Capaian tahun 2024 ini dapat tercapai dengan konsolidasi antara fungsi perencanaan, fungsi keuangan serta fungsi di bidang dan bagian. BNNP Jawa Tengah mengembangkan sistem kerja pada proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan menerbitkan Surat Perintah Staf Yang Membidangi Perencanaan dan Keuangan di masing-masing Bidang. Koordinasi internal di dalam fungsi keuangan dan perencanaan serta pembatasan revisi serta pengusulan Halaman III DIPA juga menjadi salah satu kunci keberhasilan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kerjasama Pelaksana pada Fungsi Perencanaan, Fungsi Keuangan dan Fungsi di masing-masing bidang menjadi motor utama keberhasilan capaian NKA ini. Serta menjalin komunikasi intensif dengan *stakeholder* eksternal yaitu Kanwil DJPb dan KPPN sehingga ketika ada kendala atau permasalahan bisa mendapatkan solusi.

Gambar 4
PERBANDINGAN CAPAIAN NKA



Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Perlu menyiapkan sistem yang lebih *rigid* dan matang agar pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan lebih lancar. Memberikan sistem *Reward and Punishment* kepada bidang yang terlambat dalam proses pencairan anggaran.

Tabel 39
DATA CAPAIAN NKA BNNP DAN BNNK JAJARAN

SATKER	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2023	2023	2024	2024	2024
BNN Provinsi Jawa Tengah	82	77,87	78	98,00	125,64%
BNN Kabupaten Kendal	86	86,74	87	100	114,94%
BNN Kabupaten Batang	88	87,10	88	99,79	113,40%
BNN Kabupaten Purbalingga	92	82,73	88	99,86	113,47%
BNN Kabupaten Cilacap	88	86,75	87	94,84	109,01%
BNN Kabupaten Temanggung	92	86,36	87	100	114,94%
BNN Kabupaten Banyumas	92	86,83	87	100	114,94%
BNN Kota Tegal	89	88,33	89	93,86	105,46%
BNN Kota Surakarta	92	86,36	87	96,96	111,45%
BNN Kabupaten Magelang	92	86,50	87	99,63	114,51%

Seluruh Satuan Kerja di wilayah BNNP Jawa Tengah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian target untuk BNNP Jawa Tengah yaitu 2 Kabupaten/Kota tercapai sebanyak seluruh 9 Kabupaten/Kota (450%). Hal ini sebuah keberhasilan atas kerjasama dari BNNP dan BNNK Jajaran.

14 Sasaran Strategis Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	94,87 Indeks	99,22 Indeks	104,58%
14	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota	8 BNN Kabupaten/ Kota	88,89 %

Definisi Operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Metode Pengukuran

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output.

yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dengan variable: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Renkas, Kesalahan SPM.

Hasil

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah mencapai target sebesar 99,22 dari target 94,87 atau sebesar 104,58%.

Tabel 40
CAPAIAN IKPA BNNP JAWA TENGAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	134	066	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	99.92	100.00	100.00	99.86	97.00	99.22	100%	0.00	99.22
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.98	10.00	10.00	9.99	24.25				
					Nilai Aspek	100.00			99.94		97.00					

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Pada target Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target terdapat 1 (satu) BNNK yaitu BNN Kota Tegal yang tidak berhasil mencapai Nilai IKPA sesuai target 99,17 hanya mencapai 99,03 (99,85%).

Kualitas Keberhasilan

Terselesainya kegiatan program dan anggaran Tahun 2024 di BNN Provinsi Jawa Tengah karena:

- Optimalisasi anggaran diikuti dengan revisi anggaran melalui koordinasi dengan BNN RI dan Bagian/Bidang yang ada di BNNP Jawa Tengah;
- Konsultasi yang intensif dengan KPPN Semarang II;
- Komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan nilai IKPA rendah antara lain:

- Perencanaan yang Kurang Matang: Perencanaan yang tidak realistis atau kurang detail akan menyulitkan dalam pelaksanaan anggaran.
- Kelemahan Sistem Pengendalian Intern: Sistem pengendalian intern yang lemah akan membuka peluang terjadinya penyimpangan dan kesalahan.
- Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah: SDM yang tidak kompeten atau kurang memiliki motivasi akan menghambat pencapaian target kinerja.
- Kurangnya Koordinasi dan Kolaborasi: Menyebabkan tumpang tindih tugas dan menghambat pelaksanaan anggaran.
- Kurangnya Dukungan Pimpinan: Kurangnya dukungan dari pimpinan akan menurunkan motivasi dan semangat kerja pegawai.
- Keterbatasan Teknologi Informasi: Keterbatasan penggunaan teknologi informasi menghambat dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan.
- Perubahan Kebijakan yang Mendadak: Perubahan kebijakan dapat mengganggu pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Tabel 41
CAPAIAN IKPA BNNP DAN BNNK JAJARAN 2023-2024

SATKER	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
BNN Provinsi Jawa Tengah	92	95,32	94,87	99,22	104,58%
BNN Kabupaten Kendal	92	99,15	99,25	99,99	100,75%
BNN Kabupaten Batang	92	97,46	97,56	99,58	102,07%
BNN Kabupaten Purbalingga	92	99,06	99,16	99,71	100,55%
BNN Kabupaten Cilacap	92	97,20	97,30	97,72	100,43%
BNN Kabupaten Temanggung	92	97,69	97,79	100	102,26%
BNN Kabupaten Banyumas	92	98,10	98,20	100	101,83%
BNN Kota Tegal	92	99,07	99,17	99,03	99,86%*
BNN Kota Surakarta	92	97,36	96,21	98,18	102,48%
BNN Kabupaten Magelang	92	96,86	96,96	99,63	102,75%

Sembilan Satuan Kerja di wilayah BNNP Jawa Tengah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan 1 (Satu) BNN Kota Tegal tidak mencapai target. Sehingga capaian target untuk BNNP Jawa Tengah yaitu 9 Kabupaten/Kota tercapai sebanyak seluruh 8 Kabupaten/Kota (88,89%).

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
15	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	86 Indeks	86,28 Indeks	100,32%

Definisi Operasional

Nilai Zona Integritas pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNN adalah hasil penilaian pelaksanaan 2 (dua) Komponen yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Pada Komponen Pengungkit terdapat 6 (enam) Area yakni; Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Serta Komponen Hasil yaitu Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel; dan Pelayanan Publik Yang Prima.

Metode Pengukuran

Komponen Pengungkit memiliki bobot 60% terdiri dari Pemenuhan 30% dan Reform 30%. Untuk Komponen Hasil memiliki bobot 40% terdiri dari Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel 22,50% dan Pelayanan Publik Yang Prima sebesar 17,50%. Penilaian Tim Penilai Internal (TPI) dilakukan setahun sekali pada bulan Oktober.

Hasil

Pelaksanaan Zona Integritas BNNP Jawa Tengah Tahun 2024 ini dinilai oleh Tim Penilai Internal BNN RI, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 42

TAHUN	CAPAIAN NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI HASIL PENILAIAN TPI			JUMLAH
	PEMENUHAN	REFORM	HASIL	
2023	24.67	24.43	35.92	85.02
2024	26.16	25.15	34.97	86.28

Kualitas Keberhasilan

Keberhasilan melampaui target sebesar 86 dengan capaian 86,28 diperoleh dari hasil perubahan susunan tim Zona Integritas serta dorongan Kepala BNNP Jawa Tengah dan Komitmen seluruh Pegawai.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Mempersiapkan segera pembangunan ZI dalam rangka mempertahankan WBK atau menuju WBBM berpedoman pada Permenpan & RB RI No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan & Evaluasi ZI Menuju WBK & WBBM di Instansi Pemerintah. Segera mengadakan rapat perubahan tim ZI untuk periode 2025 dengan prosedur/mechanisme yang jelas, ada seleksi tiap area, dan berdasarkan evaluasi pada tim ZI 2024.

B. Akuntabilitas Keuangan

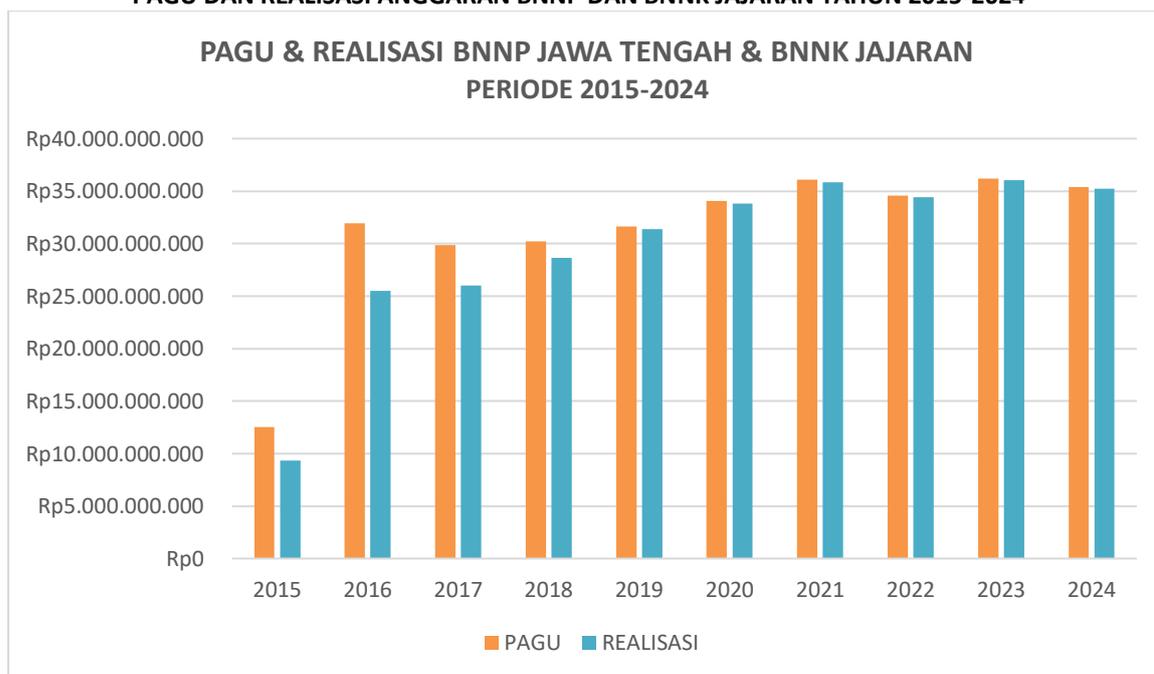
Tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah beserta BNNK jajaran mendapatkan alokasi anggaran (sesuai Pagu Anggaran di Perjanjian Kinerja BNNP Jawa Tengah) sebesar **Rp. 35,379,889,000** (Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran **Rp. 35,254,745,530,-** (Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau sebesar 99,65%.

Tabel 43
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BNNP DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2015-2024

TAHUN	PAGU	REALISASI	%	SISA
2015	Rp 12.506.428.000	Rp 9.338.762.642	74,67	Rp 3.167.665.358
2016	Rp 31.933.874.000	Rp 25.500.844.590	79,86	Rp 6.433.029.410
2017	Rp 29.843.440.000	Rp 26.023.927.726	87,20	Rp 3.819.512.274
2018	Rp 30.192.814.000	Rp 28.636.132.286	94,84	Rp 1.556.681.714
2019	Rp 31.624.745.000	Rp 31.380.817.318	99,23	Rp 243.927.682
2020	Rp 34.057.527.000	Rp 33.817.608.994	99,30	Rp 239.918.006
2021	Rp 36.102.231.000	Rp 35.837.883.168	99,27	Rp 264.347.832
2022	Rp 34.569.055.000	Rp 34.401.700.237	99,51	Rp 167.354.763
2023	Rp 36.214.303.000	Rp 36.043.957.678	99,53	Rp 170.345.332
2024	Rp 35.379.889.000	Rp 35.254.745.530	99,65	Rp 125.143.470

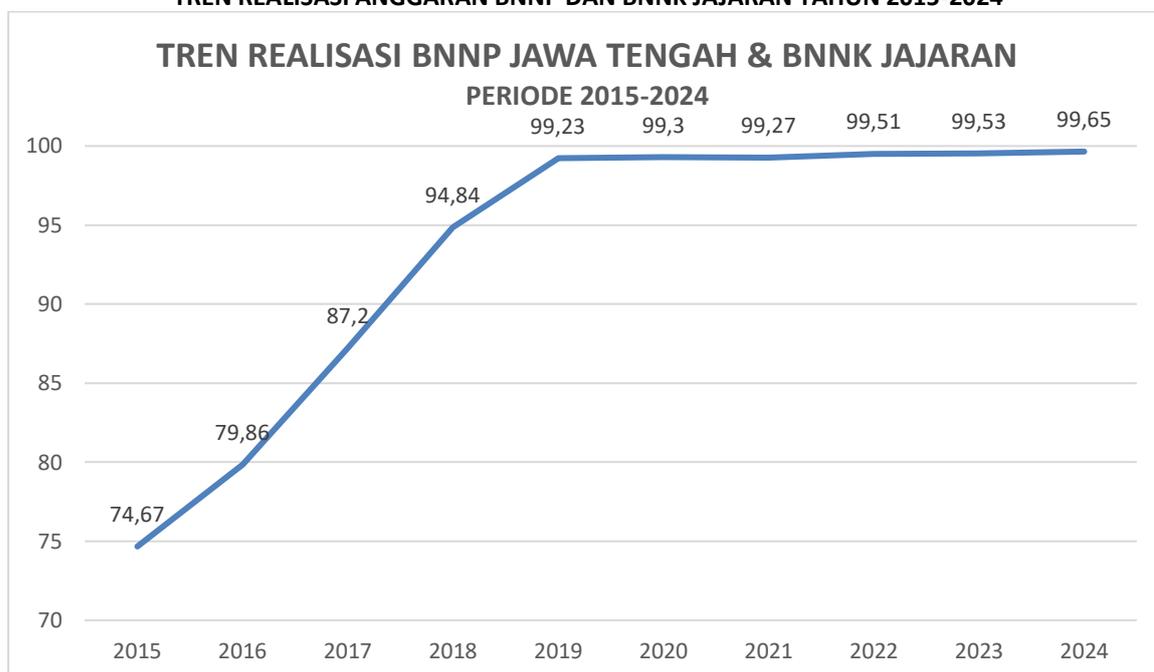
Sejak tahun 2015 hingga 2024 baik secara pagu maupun realisasi anggaran, BNNP Jawa Tengah dan BNNK Jajaran selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:

Gambar 5
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BNNP DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2015-2024



Dilihat dari sudut pandang realisasi secara presentase sejak tahun 2015 hingga 2024 BNNP Jawa Tengah dan BNNK Jajaran selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:

Gambar 6
TREN REALISASI ANGGARAN BNNP DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2015-2024



Selain itu capaian 6 tahun terakhir selalu mencapai di atas 99% melebihi target yang ditetapkan oleh BNN RI dan Kementerian Keuangan.

Tabel 44
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BNNP DAN BNNK JAJARAN PER KEGIATAN

N O	OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	794,127,000	789,086,540	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	8 Kabupaten/ Kota	7 Kabupaten/ Kota
2	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	1,026,280,000	1,016,938,636	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	6 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota
3	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	1,662.505,000	1,652.965.691	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota

N O	OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	69,300,000	68,171,000	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan
				Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	3,25 Indeks	3,27 Indeks
5	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	94,840,000	92,439,000	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68%	68,40%
6	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	151,612,000	151,110,000	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang
7	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1,466,935,000	1,429,021,421	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga	3 Lembaga
				Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	20 Unit	20 Unit
8	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,42 Indeks	3,62 Indeks
9	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	185,000,000	185,000,000	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan
10	Kegiatan Penyelidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	672,411,000	671,715,838	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	17 Berkas Perkara	23 Berkas Perkara
11	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	469,829,000	461,251,070	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks
				Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks
12	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	15,505,710,000	15,487,787,470	Nilai Kinerja Anggaran	78 Indeks	98,00 Indeks
				Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2 BNN Kabupaten/ Kota	9 BNN Kabupaten/ Kota

N O	OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
13	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	129,990,000	127,446,552			
14	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	119,180,000	115,548,600	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,87 Indeks	99,22 Indeks
				Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota	8 BNN Kabupaten/ Kota
15	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	12,926,670,000	12,901,064,127			
16	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	105,500,000	105,199,585			
17				Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	86 Indeks	86,28 Indeks
TOTAL		35,379,889,000	35,254,745,530			

BAB IV PENUTUP

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah secara umum telah melaksanakan target kinerja selama tahun 2024 dan disampaikan pertanggungjawabannya melalui Laporan Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dan Kepala BNN RI yang berisi 15 (lima belas) Sasaran Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja, tingkat capaiannya dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. Capaian **melebihi target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	180%
2	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	100,61%
3	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	100,58%
4	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	105,84%
5	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	117,64%
6	Meningkatnya Proses	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	125,64%
7	Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan NKA Mencapai Target	450%
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	104,58%
9	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	100,32%

b. Capaian **sesuai target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	100%
2	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	100%
3	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	100%
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	100%
5		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	100%
6	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	100%
7	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100%
8		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100%

c. Capaian yang **kurang/dibawah dari target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	87,50%
2	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	88,89%

2. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:
 - a. Perubahan target kinerja sebagai kebijakan dari pembina fungsi akan diikuti dengan revisi Perjanjian Kinerja.
 - b. Adanya kesempatan yang luas untuk mengikuti pengembangan kapasitas berupa Pendidikan pelatihan/bimtek bagi seluruh personil BNN Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Optimalisasi koordinasi dan Kerjasama ke seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas.
 - d. Peningkatan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. AGUS ROHMAT, S.I.K., S.H., M.Hum.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. H. AGUS ROHMAT, S.I.K., S.H., M.Hum.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	8 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	6 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,25 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	3 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	20 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42 Indeks
11	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	17 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	78 Indeks
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	2 Kabupaten/Kota
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,87 Indeks
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 Kabupaten/Kota
19	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	86 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.889.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.1.070.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.1.942.997.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.69.300.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.154.637.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.1.311.677.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.124.758.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.235.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	Rp.715.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.396.520.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.15.925.993.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.123.420.000
13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.133.458.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.12.535.328.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.110.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. H. AGUS ROHMAT, S.I.K., S.H., M.Hum.

LAMPIRAN 2
CAPAIAN DEKTARI BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2024

15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI

LAMPIRAN 3
CAPAIAN DEKTARA BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2024

94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI

LAMPIRAN 4
CAPAIAN IKOTAN BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2024

97.	Jawa Tengah	3.13	3.64	2.90	3.39	3.26	3.32	Sangat Tanggap	A
98.	Kendal	3.01	3.67	2.94	3.21	3.10	3.23	Tanggap	B
99.	Temanggung	3.19	3.67	3.23	3.54	3.14	3.40	Sangat Tanggap	A
100.	Banyumas	2.50	3.86	3.18	3.67	2.55	3.21	Tanggap	B
101.	Purbalingga	2.68	3.49	2.36	2.80	2.74	2.89	Tanggap	B
102.	Batang	3.17	3.15	2.71	3.40	3.67	3.25	Sangat Tanggap	A
103.	Cilacap	3.90	3.89	3.02	3.57	3.67	3.69	Sangat Tanggap	A
104.	Magelang	3.14	3.66	3.00	3.72	3.76	3.49	Sangat Tanggap	A
105.	Kota Surakarta	2.96	3.46	2.45	2.94	2.99	3.03	Tanggap	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	Kota Tegal	3.66	3.91	3.40	3.87	3.86	3.78	Sangat Tanggap	A

LAMPIRAN 5 CAPAIAN IKP BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2024

92	BNNK KOTABANGSA	3,34	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
100	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
101	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
102	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN 6 CAPAIAN IKPA BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	134	066	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	99.92	100.00	100.00	99.86	97.00	99.22	100%	0.00	99.22
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.98	10.00	9.99	24.25					
					Nilai Aspek	100.00		99.94		97.00						

LAMPIRAN 7 CAPAIAN NKA BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2024

MONEV | BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) | Role | Pilih TA (2024) | Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	96,78	99,22	98,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya | 1 | Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-10 10:14:34

LAMPIRAN 8
CAPAIAN IKM DAN PROSENTASE KUALITAS HIDUP
BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2024

Jawa Tengah	3.70	3.62	85.40
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

LAMPIRAN 9
CAPAIAN NILAI ZONA INTEGRITAS PENILAIAN INTERNAL
BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2024

Penilaian		Bobot	Nilai	%
A.	PENGUNGKIT	60,00	51,31	
I.	PEMENUHAN	30,00	26,16	87,20%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	3,78	94,50%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3,50	3,06	87,33%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	4,32	86,34%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	4,90	97,94%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	5,56	74,19%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	4,54	90,88%
II.	REFORM	30,00	25,15	83,83%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	3,42	85,50%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3,50	2,34	66,71%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	4,25	85,00%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	4,51	90,10%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	6,88	91,67%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	3,76	75,25%
TOTAL PENGUNGKIT			51,31	85,51%
B.	HASIL	40,00	34,97	
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50	19,22	85,42%
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50	16,41	93,75%
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja	5,00	2,81	56,25%
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50	15,75	90,00%
	a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :)	17,50	15,75	90,00%
TOTAL HASIL			34,97	87,42%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			86,28	

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN
PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2024**

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	55.51	36.43	91.94
2	BNNP Jawa Timur	53.21	34.98	88.19
3	BNNP Nusa Tenggara Barat	51.47	36.59	88.06
4	BNNP Sumatera Selatan	51.24	36.26	87.50
5	BNNP Sulawesi Selatan	49.82	36.90	86.72
6	BNNP Jawa Tengah	51.31	34.97	86.28
7	BNNP Bali	49.75	36.52	86.27
8	BNNP Kalimantan Selatan	50.66	34.86	85.52
9	BNNP Kalimantan Tengah	49.97	35.03	85.00
10	BNNP Lampung	50.42	34.53	84.95
11	BNNP Sumatera Barat	51.49	31.83	83.32
12	BNNP Banten	47.17	35.92	83.09
13	BNNP Jawa Barat	48.79	34.24	83.03
14	BNNP Sulawesi Barat	46.53	34.53	81.06
15	BNNP Kepulauan Riau	43.82	36.63	80.45
16	BNNP Sumatera Utara	45.59	34.44	80.03
17	BNNP Papua Barat	45.32	34.48	79.80
18	BNNP Kalimantan Timur	43.10	36.34	79.44
19	BNNP Riau	41.80	34.04	75.84
20	BNNP Maluku	43.62	32.05	75.67
21	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	39.30	35.99	75.29
22	BNNP Kalimantan Barat	40.72	34.33	75.05
23	BNNP Sulawesi Tenggara	41.54	33.50	75.04
24	BNNP DKI Jakarta	41.77	33.26	75.03
25	BNNP Aceh	41.74	33.28	75.02
26	BNNP Sulawesi Utara	31.94	36.87	68.81

BNN PROVINSI JAWA TENGAH 2024

#JatengBersinarPerangiNarkobaBarengBareng

 @BnnProvJateng

 BNN Provinsi Jawa Tengah

 BNN PROV JATENG

 infobnn_prov_jawatengah

 bnn.provinsi.jawatengah